

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGARUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELIBATAN LINTAS SEKTORAL DALAM MANAJEMEN
PENGEMBANGAN PNPM MANDIRI TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen**

Disusun Oleh :

YAMINUDIN HALAWA

NIM. 500014281

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2015**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN**

PERYATAAN

TAPM yang berjudul “Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat dan Pelibatan Lintas Sektoral dalam Manajemen Pengembangan PNPM Mandiri terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa” adalah karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Juni 2015
Yang Menyatakan



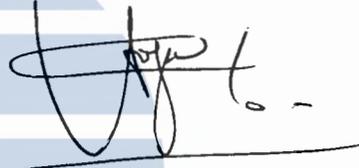
YAMINUDIN HALAWA
NIM: 500014281

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

Judul TAPM : Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat dan Pelibatan Lintas Sektoral dalam Manajemen Pengembangan PNPM Mandiri Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa

Penyusun TAPM : Yaminudin Halawa
NIM : 500014281
Program Studi : Magister Manajemen
Hari/Tanggal : Minggu/07 Juni 2015

Menyetujui :

<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Elisabeth Siahaan, SE., MM NIP. 19780313 200212 2 001</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Dr. Tri Darmayanti, M.A NIP.</p>
<p>Penguji Ahli</p>  <p>Dr. Chairy, MM NUP. 060603893</p>	
<p>Mengetahui :</p>	

Ketua Bidang Ilmu/Program Magister
Ilmu Manajemen



Mohamad Nasoha, SE., M.Sc
NIP. 19781111 200501 1 001

Direktur Pascasarjana



Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU MANAJEMEN

PENGESAHAN

Nama : Yaminudin Halawa
NIM : 500014281
Program Studi : Magister Manajemen

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
Program Studi Ilmu Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:
Hari/Tanggal : Minggu/ 07 Juni 2015
Waktu : 12.30 – 14.30

Dan dinyatakan **LULUS**

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji

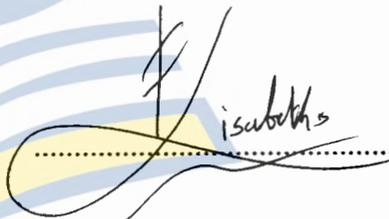
Drs. Moh. Muzammil, MM
NIP. 19610917 198703 1 002



Penguji ahli
Dr. Chairy, MM
NUP. 060603893



Pembimbing I
Dr. Elisabeth Siahaan, SE., MM
NIP. 19780313 200212 2 001



Pembimbing II

Dr. Tri Darmayanti, M.A
NIP.



ABSTRAK

PENGARUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELIBATAN LINTAS SEKTORAL DALAM MANAJEMEN PENGEMBANGAN PNPM MANDIRI TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA

YAMINUDIN HALAWA
yaminudinhalawa@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka Indonesia

Tantangan kemiskinan yang dihadapi Indonesia masih besar dan rumit. Kemiskinan itu rumit karena mencakup berbagai macam aspek seperti pemenuhan kebutuhan makanan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia membutuhkan dukungan dan kerjasama yang serius antara masyarakat dan Pemerintah

Sejumlah pendekatan langsung maupun tak langsung telah digunakan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Diantara upaya-upaya pengentasan kemiskinan secara langsung adalah pelaksanaan program PNPM Mandiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat dan Pelibatan Lintas Sektoral Dalam Manajemen Pengembangan PNPM Mandiri terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dilaksanakan pada 249 responden. Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 18. Teknik sampling yang dipakai adalah metode sensus dan teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji eksternal validitas dengan membandingkan Corrected Item-Total Correlation dan r_{tabel} , uji reliabilitas dengan Alpha Cronbach. Uji asumsi klasik dan analisis regresi liner berganda, untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan pemberdayaan masyarakat dan pelibatan lintas sektoral dalam manajemen pengembangan PNPM Mandiri terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa baik secara partial maupun secara simultan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pelibatan Lintas Sektoral dan Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

Influence of Community Empowerment and Cross Sectoral Involvement in Management Development of PNPM Mandiri toward Community Welfare in Gunungsitoli Alo'oa

Yaminudin Halawa
yaminudinhalawa@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

The poverty challenges facing Indonesia are still large and complex. Poverty is complex because it involves a variety of aspects such as the fulfillment of the right to food, health, education, and employment. In order to decrease poverty in Indonesia requires the support and cooperation of the public and the government's seriousness in addressing this issue.

In addition, an affective system of coordination among stakeholder is needed to provide support. Several direct and indirect approaches have been employed in order to alleviate poverty in Indonesia. Among the direct poverty reduction efforts launched. One of them PNPM Mandiri program.

The research aims to examine and analyze the influence of community empowerment and cross sectoral involvement in management development of PNPM Mandiri toward community welfare in Gunungsitoli Alo'oa.

Data collected through distribution of questionnaires and it is implemented to 249 respondents. Analysis of data in this research using SPSS version 18. Sampling technique uses purposive sampling and data test technique is used within the research includes external validity by comparing Corrected Item-Total Correlation with r_{label} factor analysis, reliability test with cronbach. Classic assumption test, multiple linear regression analysis, and determination coefisient test, F test and t test to verify and to prove the research hypothesis.

Result of the research showed that community empowerment and cross sectoral involvement in partial and simultaneously cosideration significantly affect the community welfare.

Key words : community empowerment, cross sectoral involvement, and welfare

RIWAYAT HIDUP

Penyusun TAPM : Yaminudin Halawa

NIM : 500014281

Program Studi : Ilmu Manajemen

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SD Negeri 075016 Gunungsitoli pada tahun 1989

Lulus SMP di ST Gunungsitoli pada tahun 1992

Lulus SMA di SMU Negeri 3 Gunungsitoli pada tahun 1995

Riwayat Pendidikan : Tahun 2007 s/d 2009 sebagai Guru di SMPN 1 Gunungsitoli Idanoi;

Tahun 2009 s/d 2009 sebagai staff di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;

Tahun 2009 s/d 2009 sebagai staff di BKD Kota Gunungsitoli;

Tahun 2009 s/d 2013 sebagai Kasubid Kependidikan di BKD Kota Gunungsitoli;

Tahun 2013 s/d sekarang sebagai Sekretaris di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli.

Medan, Juni 2015

Yang Menyatakan



YAMINUDIN HALAWA

NIM: 500014281

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat dan anugrahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan TAPM ini. TAPM ini berjudul “Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat dan Pelibatan Lintas Sektoral Dalam Manajemen Pengembangan PNPM Mandiri terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa”. TAPM ini ditulis sebagai laporan penelitian untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Selama proses penyusunan TAPM ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih saya berikan kepada:

1. Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Drs. Amril Latif, M.Si., selaku Kepala UPBJJ Universitas Terbuka (UT) Medan
3. Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Ilmu Manajemen Universitas Terbuka.
4. Pembimbing I Dr. Elisabeth Siahaan, MM, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan tentang pelaksanaan penelitian dan pembuatan TAPM ini.
5. Pembimbing II Dr. Tri Darmayanti, MA, selaku dosen pembimbing II atas bimbingan dan arahnya.
6. Prof. Dr. Hapzy Ali, MM, selaku Pembahas Ahli yang telah memberikan revisi dan masukan dalam penulisan TAPM ini.

7. Bapak Walikota Gunungsitoli.
8. Bapak Camat Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli
9. Bapak Camat Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli
10. Para Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Magister Manajemen Universitas Terbuka.
11. Istriku tercinta Listariani Zebua, S.Th yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
12. Putri-putriku tersayang Michelle Tabitha Manuela Halawa dan Cleo Bleshinta Manuela Halawa yang selalu memberi inspirasi dan semangat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
13. Teman-teman mahasiswa pasca sarjana UPJJB Medan Pokjar Gunungsitoli.
14. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu proses pembuatan hingga TAPM ini selesai.

Kendatipun demikian penulis menyadari bahwa penulisan TAPM ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis megharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca yang budiman. Akhirnya, penulis berharap agar TAPMi ini mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Gunungsitoli, Juni 2015

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
PERYATAAN.....	ii
LEMBAR LAYAK UJI DALAM UJIAN SIDANG TAPM	iii
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER	iv
PENGESAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Manajemen Pengembangan PNPM Mandiri	10
a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	10
b. Dimensi Pemberdayaan.....	13
2. <i>Pelibatan Lintas Sektoral dalam Pengembangan Manajemen PNPM Mandiri.....</i>	<i>16</i>
a. Peningkatan Integrasi dan Koordinasi Pusat dan Kemitraan Pusat – Daerah	16
b. Penguatan Sistem dan Mekanisme <i>Pro-Poor Budgeting</i> untuk Kesinambungan Program Pemberdayaan Masyarakat.....	18
c. Pemeliharaan Aset Hasil Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah	19
d. Upaya Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Kemiskinan	19

3. Kesejahteraan Masyarakat	22
a. Konsep Kemiskinan	22
b. Dimesi Kemiskinan.....	24
c. Penanganan Masalah Kemiskinan	29
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Konseptual.....	32
D. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Desain Penelitian	34
B. Populasi dan Sampel.....	34
1. Populasi.....	34
2. Sampel.....	36
C. Variabel Penelitian.....	36
D. Instrumen Penelitian	38
1. Alat Pengumpulan Data	38
2. Kisi-kisi Angket.....	38
3. Validitas dan Reliabilitas	41
a. Uji validitas	42
b. Uji reliabilitas tes	45
E. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
F. Prosedur Pengumpulan Data.....	46
G. Metode Analisis Data.....	46
1. Uji Multikolinearitas.....	46
2. Uji Heteroskedastisitas.....	48
3. Uji Normalitas.....	48
4. Menghitung Koefisien Korelasi Regresi Linear Berganda.....	48
5. Uji hipotesis	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
1. Letak dan Geografis	51

2. Pemerintahan.....	52
3. Penduduk.....	53
4. Sektor Pendidikan dan Kesehatan.....	55
B. Analisa Data.....	58
1. Deskripsi Data Penelitian.....	58
a. Deskripsi Variabel Pemberdayaan Masyarakat	58
b. Deskripsi Variabel Pelibatan Lintas Sektoral	62
c. Deskripsi Variabel Kesejahteraan Masyarakat	71
2. Uji Asumsi Klasik.....	75
a. Uji Multikolinieritas.....	75
b. Uji Heterokedastisitas	76
c. Uji Normalitas.....	77
C. Analisa Persamaan Regresi Linear Berganda	78
D. Pengujian Hipotesis	80
1. Uji Secara Serempak (Uji F).....	80
2. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	81
3. Uji Secara Parsial (Uji t).....	82
a. Uji Hipotesis 1	82
b. Uji Hipotesis 2	83
c. Uji Hipotesis 3	84
E. Pembahasan Hasil Penelitian.....	84
1. Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Manajemen PNPM Mandiri Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	85
2. Pengaruh Pelibatan Lintas Sektoral dalam Pengembangan Manajemen PNPM Mandiri Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	88
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Penyebaran Populasi.....	35
Tabel 3.2 Penyebaran Sampel Penelitian.....	36
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	39
Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Validitas Variabel Pemberdayaan Masyarakat	43
Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Validitas Variabel Pelibatan Lintas Sektoral	43
Tabel 3.6 Hasil Perhitungan Validitas Variabel Kesejahteraan Masyarakat	44
Tabel 3.7 Perhitungan Reliabilitas tiap Variabel	45
Tabel 4.1 Letak dan Batas Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Tahun 2013	52
Tabel 4.2 Klasifikasi Desa di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Tahun 2013.....	53
Tabel 4.3 Luas Wilayah, Rasio terhadap Luas, Jumlah Penduduk dan Rasio Sex di kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Tahun 2013	54
Tabel 4.4 Keberadaan Gedung Sekolah di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa	56
Tabel 4.5 Keadaan Siswa di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.....	56
Tabel 4.6 Keadaan Guru di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.....	57
Tabel 4.7 Keadaan Sarana Kesehatan di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.....	57
Tabel 4.8 Tanggapan Responden terhadap Variabel Pemberdayaan Masyarakat.....	58
Tabel 4.9 Tanggapan Responden terhadap Variabel Pelibatan Lintas Sektoral.....	62
Tabel 4.10 Tanggapan Responden terhadap Variabel Kesejahteraan Masyarakat.....	71
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Multikoleniaritas	75
Tabel 4. 12 Persamaan Regresi.....	79
Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Secara Simultan	80
Tabel 4.14 Koefisien Determinasi	81
Tabel 4.15 Hasil Uji t Secara Parsial	82



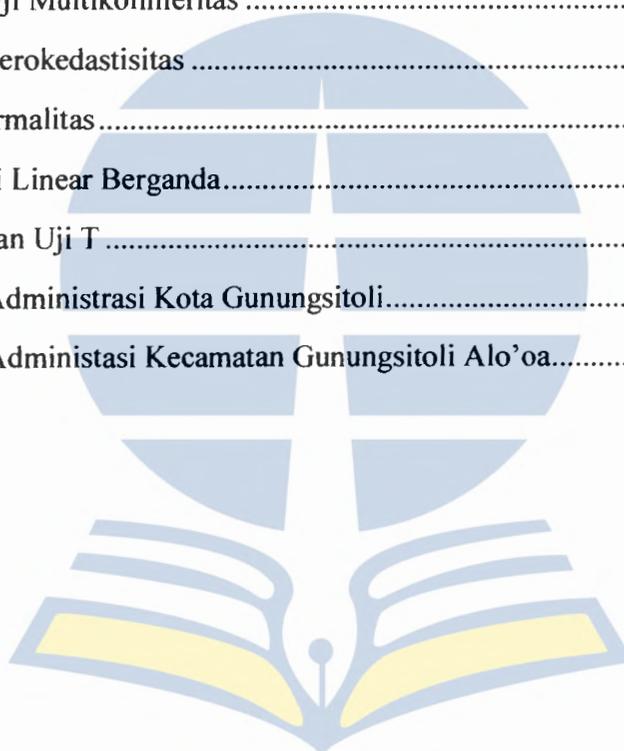
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	33
Gambar 3.1 Variabel Penelitian.....	37
Gambar 4.1 Grafik Scatterplot.....	76
Gambar 4.2 P-P Plot Regresi Standar Residual.....	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Angket	97
Lampiran 2 Validitas dan Reliabilitas Variabel Pemberdayaan Masyarakat	105
Lampiran 3 Validitas dan Reliabilitas Variabel Pelibatan Lintas Sektoral	107
Lampiran 4 Validitas dan Reliabilitas Variabel Kesejahteraan Masyarakat	109
Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinieritas	111
Lampiran 6 Uji Heterokedastisitas	116
Lampiran 7 Uji Normalitas	118
Lampiran 8 Regresi Linear Berganda	120
Lampiran 9 Uji F dan Uji T	121
Lampiran 10 Peta Administrasi Kota Gunungsitoli	122
Lampiran 11 Peta Administasi Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa	123



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan tujuan dari setiap individu. Masyarakat mengharapkan kondisi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Disisi lain juga disadari kehidupan masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Proses perubahan dapat terjadi dengan cepat atau lebih lambat. Proses perubahan dapat juga dilihat dari segi dampaknya, ada yang berdampak konstruktif dan dan berdampak sebaliknya. Dari kenyataannya, masyarakat menginginkan perubahan yang bersifat konstruktif yaitu menuju kondisi yang lebih baik. Indikasi penting dari kondisi kehidupan yang lebih baik dengan ditandai peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dari kehidupan sehari-hari, perubahan tersebut dapat dilihat sebagai proses yang bersifat spontan. Pemahaman ini menjelaskan fenomena perkembangan masyarakat sebagai proses spontan menuju tahap perkembangan yang lebih tinggi. Proses spontanitas ini diikuti semakin tampilnya potensi masyarakat dan aktualisasi kapasitas menuju kedewasaan. Dari pendekatan lain, perkembangan masyarakat menuju ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi tidak dilihat semata dari proses spontan, tetapi dari proses induksi atau campur tangan dari pihak lain. Dalam proses ini masyarakat diinduksi secara sadar dan terencana melalui program tertentu. Zalman (1973:2) membedakan perubahan sosial menjadi dua bagian yaitu *planned social change* dan *unplanned social change*. Proses induksi yang dirancang dalam program pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan lebih menekankan pada pendekatan proses bukan mengutamakan target dan hasil material (Sutomo: 2006).

Tantangan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan program pembangunan pemerintah dari tahun ke tahun semakin besar dan rumit. Indonesia sebagai suatu negara memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran yang berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendekatan Kemiskinan khususnya di Negara Indonesia dapat dipandang dari tiga pendekatan yaitu 1) kemiskinan alamiah, 2) kemiskinan struktural, dan 3) kesenjangan antar wilayah.

Dari pengamatan langsung di lapangan dan di dukung data skunder dari kantor kecamatan Gunungsitoli Alo'oa menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di kecamatan Gunungsitoli Alo'oa masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah masyarakat pemegang kartu BPJS subsidi pemerintah dan masyarakat penerima program raskin diatas 80% dari jumlah penduduk 6.878 jiwa. Dari segi kebutuhan mendasar sebagian besar masyarakat kecamatan Alo'oa belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Keadaan ini dipertegas dengan sarana prasarana yang tidak mendukung dimana baru 3 desa dari total 9 desa yang dapat dijangkau dengan fasilitas jalan aspal. Perkeekonomian yang berbasis hasil pertanian sawah dan karet tidak dapat dimaksimalkan dengan kondisi sarana prasarana yang minim juga pengolahan hasil panen yang bersifat tradisional.

Dari hasil wawancara dan data dari praktisi kesehatan, diperoleh informasi seharusnya 1) ibu yang sedang mengandung minimal diperiksa oleh tenaga kesehatan (bidan)

4 kali selama mengandung, 2) setiap ibu yang sedang mengandung setidaknya memperoleh 90 butir pil Fe yang berfungsi sebagai penambah dara, 3) idealnya pada proses kelahiran dibantu dan ditanangi oleh tenaga kesehatan (bidan/dokter), 4) ibu yang telah melewati proses persalinan beserta bayi yang dilahirkannya seharusnya memperoleh perawatan sekurang-kurangnya dua kali dalam rentang waktu empat puluh hari yang ditanangi oleh bidan dan., 5) bayi yang berusia dibawah dua belas bulan wajib memperoleh imunisasi secara, 6) bayi yang berusia dibawah dua belas bulan wajib ditimbang berat dan memiliki kecenderungan naik setiap bulan dan 7) Vitamin A wajib diberikan kepada anak yang berusia enam sampai dengan lima puluh sembilan bulan sebanyak dua kali dalam satu tahun.

Data yang diperoleh dari praktisi kesehatan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan layanan kesehatan mendasar yang seharusnya diterima oleh masyarakat tidak tercapai secara maksimal. Dari aspek sarana pendukung kesehatan, kecamatan Gunungsitoli Alo'oa tergolong tertinggal. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa hanya memiliki 1 unit puskesmas dan 1 unit pusku dengan tenaga medis yang terbatas tanpa kehadiran dokter.

Sarana pendidikan dan pendukungnya semakin mempertegas tingkat kemiskinan masyarakat. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa memiliki 9 unit Sekolah Dasar dengan jumlah siswa 1.226 orang dan dilayani 55 orang guru. Sekolah Menengah Pertama berjumlah 3 unit dengan jumlah siswa 313 orang dan dilayani 7 orang guru, sedangkan Sekolah Menengah Atas (sederajat/SMK) hanya 1 unit dengan jumlah siswa 159 orang dan dilayani 5 orang guru. Gambaran ini menunjukkan tingkat partisipasi usia sekolah masih rendah yang mungkin dipengaruhi jumlah sarana yang tidak mencukupi dan kebutuhan guru yang minim, namun

konsekuensi akibat rendahnya angka partisipasi usia sekolah dalam melanjutkan pendidikan formal berhubungan erat dengan perbaikan taraf hidup masyarakat pada masa depan.

Peranan pemerintah daerah semakin penting sejak pelaksanaan otonomi daerah. Sejumlah kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, sulit bagi pemerintah daerah untuk merespon masalah kemiskinan secara terpadu dan menyeluruh. Dalam struktur pemerintah sekarang, ujung tombak penanggulangan kemiskinan adalah pemerintah daerah. Untuk mewujudkan efektifitas program yang berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan dukungan aktif dari berbagai pemangku kepentingan.

Usaha untuk mengurangi angka kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pendekatan berbasis masyarakat yang didukung oleh pendekatan multi dimensi menanggulangnya dengan menerapkan strategi pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan menggunakan pendekatan multi disiplin terus dikembangkan oleh pemerintah. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri merupakan program pemberdayaan masyarakat yang mencakup seluruh masyarakat di wilayah manapun, baik pedesaan, perkotaan, wilayah khusus serta desa. Salah satu program PNPM Mandiri adalah PNMP Mandiri pedesaan yang merupakan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan dan berkesinambungan. (PTO PNPM Mandiri;2008).

Sesuai dengan PTO PNPM Mandiri yang menyatakan bahwa visi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Dari visi tersebut dijabarkan

bahwa kesejahteraan mengacu pada pengertian terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (sandang, pangan dan papan), sedangkan kemandirian mengacu pada pengertian adanya kemampuan masyarakat dalam mengorganisir diri serta menggerakkan sumber daya yang ada di tingkat lingkungannya, adanya kemampuan mengakses sumber daya yang berada di luar lingkungannya, dan adanya kemampuan dalam pengelolaan sumber daya dimaksud yang bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Selain visi tersebut di atas, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Pedesaan mencanangkan misi yaitu

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Roadmap PNPM Mandiri : 2012)

Pencapaian visi dan misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Pedesaan dilaksanakan dengan menggunakan strategi penguatan masyarakat miskin yang memposisikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, dengan harapan kelompok sasaran ini akan menjadi bagian dari sistem pembangunan yang bersifat partisipatif.

Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat partisipatif masyarakat ditandai dengan tercapainya

indikator pelibatan masyarakat. Indikator pemberdayaan masyarakat yang digagas oleh PKPM JIKA-Bappenas dapat digunakan sebagai acuan pelibatan masyarakat dalam pengembangan manajemen PNPM Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat delapan indikator yang dirumuskan yaitu 1) Masyarakat mampu menjelaskan potensi yang ada dan cara menggunakannya, 2) Masyarakat mengetahui apa yang sudah dilakukannya dan apa yang sudah dicapainya, 3) Masyarakat mampu membangun visi, analisa masalah, identifikasi isu dan mampu memecahkan masalah, 4) Masyarakat merumuskan tujuan, sasaran, hasil, kegiatan, dana dan waktu, 5) Masyarakat mempunyai rencana sendiri untuk memelihara dan mengembangkan kegiatan yang telah ada, 6) Masyarakat mengetahui apa yang dapat dilakukan dan dukungan apa yang dibutuhkan dari pihak luar, 7) Masyarakat berkerja sama berdasarkan peran spesifik dari masing-masing pemangku kepentingan, dan 8) Masyarakat menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru dari kerjasama dengan pemangku kepentingan.

PNPM Mandiri memberikan dampak yang relatif signifikansinya lebih kecil pada kecamatan-kecamatan yang tidak miskin dan juga proses pembangunan partisipasi masyarakat belum seutuhnya berjalan secara optimal terutama bagi masyarakat di daerah terpencil maupun tertinggal. Dengan demikian, menjadi tantangan Pemerintah untuk terus memperbaiki rancangan PNPM Mandiri khususnya untuk dapat mengakomodasi berbagai hal tersebut. PNPM Mandiri menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat merupakan ujung tombak berhasilnya program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan memberikan kontribusi baik dalam bentuk fisik maupun pendanaan. Salah satu bentuk partisipasi yang diharapkan PNPM Mandiri adalah adanya jaminan keberlangsungan proses

kegiatan PNPM di daerahnya dalam bentuk hibah tanah dan keikutsertaan masyarakat dalam bekerja untuk memaksimalkan program-program PNPM Mandiri,

Masyarakat merupakan pelaku utama dari proses perubahan untuk keluar dari kemiskinan dengan dukungan pemerintah dan program-program pemberdayaannya. Dari uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan memilih judul, “Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat dan Pelibatan Lintas Sektor dalam Manajemen Pengembangan PNPM Mandiri terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan dalam manajemen pengembangan PNPM Mandiri terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa?
2. Apakah pelibatan lintas sektoral berpengaruh signifikan dalam manajemen pengembangan PNPM Mandiri terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa?
3. Apakah pemberdayaan masyarakat dan pelibatan lintas sektoral secara bersama-sama berpengaruh signifikan dalam manajemen pengembangan PNPM Mandiri terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh signifikan antara pemberdayaan masyarakat dalam manajemen pengembangan PNPM Mandiri terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.
2. Pengaruh signifikan antara pelibatan lintas sektoral dalam manajemen pengembangan PNPM Mandiri terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.
3. Pengaruh signifikan secara bersama-sama antara pemberdayaan masyarakat dan pelibatan lintas sektoral dalam manajemen pengembangan PNPM Mandiri terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan PNPM Mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pelibatan lintas sektoral.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia.

3. Bagi peneliti lain yang akan mengembangkan penelitian sejenis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dan masukan dalam proses pengembangan manajemen PNPM Mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan menambahkan karya ilmiah yang berkualitas bagi Universitas Terbuka dalam program pengembangan pendidikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Manajemen Pengembangan PNPM Mandiri

a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat itu sendiri yang berarti adanya kemampuan untuk menentukan kehidupan sendiri, untuk terlibat pada keseluruhan aktifitasnya di tengah-tengah lingkungan masyarakat itu sendiri. Pelibatan masyarakat secara partisipatif dilaksanakan melalui komunikasi dua arah yang saling melengkapi serta membangun. Konsep dasar dari pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dengan adanya pendampingan dari pihak luar untuk menyelesaikan yang sedang mereka hadapi dengan cara memaksimalkan akses pada sumber daya setempat. Pemecahan masalah dan pengembangan berlangsung secara berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada pihak-pihak dan bantuan dari luar. Pemberdayaan memiliki orientasi mengembangkan kekuatan dan kemampuan serta potensi sumber daya masyarakat agar mampu memecahkan persoalannya sendiri.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep dalam rangka membangun serta mengembangkan ekonomi yang meliputi nilai-nilai sosial di masyarakat. Konsep ini menunjukkan paradigma pembangunan yang bersifat:

1) People centered

- 2) *Participatory*
- 3) *Empowering*
- 4) *Sustainable*

(Chambers, 1995)

Menurut Friedman (1992) konsep pemberdayaan masyarakat disebut sebagai “*Development*”, yang menghendaki: *Inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and inter generational equality*.

Pemberdayaan merupakan upaya dalam mengembangkan potensi dan daya masyarakat dengan memberikan memotivasi, mendorong, serta membangkitkan kesadaran diri akan potensi yang dimilikinya sekaligus berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan bukan hanya menguatkan setiap individu yang menjadi anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya, dengan cara menawarkan nilai-nilai budaya.

Konsep pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan akhir memberdayakan dan menguatkan masyarakat yang lemah atau masyarakat yang belum dapat mengakses kebutuhan mendasar (Ife, 1996). Pemberdayaan masyarakat menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swif dan Levin, 1987). Hal ini sejalan dengan pendapat Rappaport (1984) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat merupakan cara dimana masyarakat, struktur organisasi, serta komunitas-komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Parson, et all, (1994) sejalan dengan pendapat di atas dengan menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses dimana kondisi masyarakat yang sebelumnya memiliki kelemahan menjadi cukup kuat untuk terlibat secara aktif dalam, saling berbagi pengendalian atas, dan saling menunjukkan pengaruh terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang memiliki pengaruh atas kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat memberikan penekanan bahwa seseorang yang telah cukup memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan diharapkan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan lingkungannya.

Berdasarkan pengertian di atas, pemberdayaan dapat digeneralisasikan sebagai sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses merupakan serangkaian aktivitas dalam memperkuat kapasitas atau kemampuan kelompok marginal dalam masyarakat. Pemberdayaan sebagai tujuan mengacu pada situasi dan *output* yang akan dan ingin dicapai sebagai bagian dari perubahan sosial yaitu perubahan masyarakat miskin yang memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kapasitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi serta sosial. Perubahan tersebut mencakup kepercayaan diri, kemampuan menyampaikan aspirasi, memiliki penghasilan dari mata pencaharian yang tetap, terlibat dalam kegiatan sosial bermasyarakat, serta mandiri dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

Shuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang disebut *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Girvan, 2004):

- 1) Kebebasan mobilitas yaitu adanya kemampuan secara individu untuk bepergian selain dari tempat tinggalnya.
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil yaitu adanya kapabilitas secara individu untuk memperoleh barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan cara melakukan pembelian.
- 3) Kemampuan membeli komoditas besar yaitu adanya kapabilitas secara individu melakukan pembelian kebutuhan sekunder.
- 4) Secara aktif dan menunjukkan peran dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan di tingkat keluarga (rumah tangga)
- 5) Kebebasan relative dari dominasi keluarga.
- 6) Memiliki kesadaran akan hukum dan politik.
- 7) Memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan kampanye dan protes-protes.
- 8) Adanya jaminan secara ekonomi dan berkontribusi terhadap keluarga.

b. Dimensi Pemberdayaan

Kieffer dalam Suharto (1997) mengemukakan tiga kompetensi yang merupakan bagian dari dimensi pemberdayaan yaitu:

- 1) Kompetensi kerakyatan
- 2) Kemampuan sosiopolitik
- 3) Kompetensi partisipatif.

Sejalan dengan pendapat di atas, Parsons et al (1994) menyatakan tiga dimesi pemberdayaan yaitu:

- 1) Proses pembangunan yang diawali dari pertumbuhan secara individual yang berkembang menjadi sebuah gerakan yang lebih besar untuk mencapai perubahan sosial.
- 2) Keadaan psikologis yang ditandai oleh munculnya rasa percaya diri, memiliki kesadaran akan keterlibatan dalam masyarakat serta mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- 3) Pembebasan yang muncul dari sebuah gerakan social.

Salah satu kompetensi pemberdayaan adalah tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan tersebut. Menurut Arnstein (dalam Panudju, 1999:72-76) tingkatan partisipatif terdiri dari delapan yaitu:

- 1) *Manipulation* atau manipulasi. Merupakan tingkat partisipasi yang terendah dimana masyarakat hanya digunakan namanya saja sebagai bagian dalam berbagai badan penasehat. Pada tingkatan ini tidak terdapat peran masyarakat secara nyata karena hanya diselewengkan sebagai publikasi oleh pihak penguasa.
- 2) *Therapy* atau terapi. Pencitraan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat pada tingkat proses perencanaan, para perancang memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Masyarakat berpartisipasi dalam banyak aktivitas dan kegiatan, namun pada kenyataannya aktivitas dan kegiatan tersebut lebih banyak berfungsi mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari mereka.
- 3) *Informing* atau pemberian informasi. Merupakan tahap memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak, tanggung jawab dan kewajiban. Pada tingkat ini, biasanya informasi diberikan secara utuh satu arah dari penguasa kepada rakyat, namun rendah

tingkat penerimaan umpan balik, sehingga kecil kesempatan rakyat untuk mempengaruhi dalam menentukan suatu rencana.

- 4) *Consultation* atau konsultasi. Tingkat konsultasi bertujuan dalam rangka mengumpulkan pendapat masyarakat setelah mereka diberi informasi. Tingkat keberhasilan dengan menggunakan cara ini relatif rendah disebabkan tidak adanya jaminan kepedulian dan gagasan masyarakat akan ditindaklanjuti. Tahap ini biasanya dilakukan dengan cara pertemuan lingkungan, survey tentang pola pikir masyarakat dan dengan dengar pendapat publik.
- 5) *Placation* atau perujukan. Pada tingkat ini aspirasi masyarakat sudah mulai mempunyai dampak meskipun sebagian besar kebijakan masih digariskan oleh pihak penguasa. Masyarakat yang memiliki potensi diakomodir sebagai anggota dalam struktur badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat. Keanggotaan masyarakat masih belum dominan karena sebagian besar anggota badan-banda kerjasama tersebut didominasi oleh wakil dari berbagai instansi pemerintah.
- 6) *Partnership* atau kemitraan. Pada tingkatan ini, masyarakat dan pemerintah berdiri sebagai mitra dimana kebijakan berdasarkan atas kesepakatan bersama antara masyarakat dengan pihak penguasa. Kesepakatan tersebut meliputi pembagian tanggungjawab dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, penyusunan arah kebijaksanaan dan pemecahan permasalahan yang dihadapi.
- 7) *Delegated Power* atau pelimpahan kekuasaan. Pada tingkatan ini masyarakat diberi kepercayaan wewenang dalam membuat dan memutuskan kebijakan pada rencana atau

program tertentu. Masyarakat memiliki hak menentukan program-program yang bermanfaat bagi mereka.

- 8) *Citizen Control* atau masyarakat yang mengontrol. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur kebijakan program kegiatan serta struktur kelembagaan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Masyarakat memiliki otoritas dan memiliki peluang untuk mengadakan kesepakatan dengan pihak-pihak lain yang berkeinginan terlibat dalam melakukan perubahan..

2. Pelibatan Lintas Sektoral dalam Pengembangan Manajemen PNPM Mandiri

a. Peningkatan Integrasi dan Koordinasi Pusat dan Kemitraan Pusat – Daerah

Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan memperkuat kapasitas dan kualitas pemerintah daerah. Di lain pihak keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pembangunan dapat mengurangi beban kerja Pemerintah Pusat. Sesuai dengan sngata otonomi daerah, Pemerintah Pusat secara perlahan dan bertahap mengalihkan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan di level daerah. Pengelolaan program dialihkan secara bertaha kepada Pemerintah Daerah tanpa mengesampingkan pendampingan sampai dicapainya standar yang dibutuhkan. Pemerintah Daerah juga diharapkan memiliki inisiatif seiring dengan kebebasan dalam menentukan serta mengembangkan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat sesuai dengan dengan keadaan dan kebutuhan di wilayahnya.

Salah satu syarat program pemberdayaan masyarakat adanya keberlanjutan program yang muncul dari keterlibatan serta dukungan penuh dari pemerintah daerah dan terlebih-lebih dari pihak masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan proses pemberdayaan. Integrasi mekanisme penganggaran yang ditujukan pada program pemberdayaan masyarakat harus seiring dengan integrasi perencanaan partisipatif yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan adanya integrasi penganggaran mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah yang menyebabkan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai proses pembangunan di level daerah..

Mekanisme pembiayaan program pemberdayaan masyarakat yang selama ini diterapkan adalah melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) yang disalurkan melalui DIPA Sektoral. Keterbatasan dari mekanisme ini disebabkan alokasi DIPA dibatasi hanya untuk setiap Tahun Anggaran berkenan. Keberhasilan program pemberdayaan tidak diukur dari proses dan tujuan pemberdayaan masyarakat itu sendiri, namun diukur dari tingkat penyerapan anggaran yang diperoleh dari setiap akhir tahun berkenan. Situasi ini sangat berpengaruh pada proses dan pencapaian program pemberdayaan masyarakat yang relatif tidak dibatasi pada angka statistik. Program pemberdayaan masyarakat yang memiliki konsep berkesinambungan memerlukan mekanisme alternatif dalam menentukan sumber pendanaan untuk menjamin keberlanjutan dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk alternatif mekanisme sumber pendanaan dengan merubah penyaluran dana dari mekanisme Tugas Pembantuan melalui Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Sektoral kepada mekanisme '*block grant*' melalui Daftar Alokasi Dana Pemberdayaan Masyarakat (DADPM) di daerah.

Pemerintah daerah melalui tingkat kecamatan yang merupakan SKPD Kabupaten/Kota diharapkan mampu meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam mengelola, mengkoordinasikan, dan memantau penyaluran dana dan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat di wilayahnya (tingkat Desa/Kelurahan). Perangkat organisasi Kecamatan merupakan bagian utama dalam memberikan dan menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Perangkat organisasi kecamatan diharapkan terus dikembangkan dalam aspek, pengembangan kapasitas

b. Penguatan Sistem dan Mekanisme *Pro-Poor Budgeting* untuk Kestimbangan Program Pemberdayaan Masyarakat

Sejalan dengan peningkatan peran aktif Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan dengan program berbasis pemberdayaan masyarakat diperlukan kapasitas untuk memahami kemampuan fiskal daerah serta prioritas program yang akan dijalankan di wilayah pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas tersebut akan mempertegas perumusan kegiatan dan alokasi pendanaan untuk mengurangi angka kemiskinan serta memastikan jalannya program berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut agar mampu dalam menyelenggarakan *pro-poor budgeting* di dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perencanaan, serta efisiensi dan efektifitas penganggaran APBD.

c. Pemeliharaan Aset Hasil Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah

Program berbasis pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi dan dijalankan oleh pemerintah daerah yang didukung penuh oleh Pemerintah Pusat bertujuan untuk meningkatkan penyediaan dan kemudahan berbagai akses pelayanan bagi masyarakat yang berupa akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Hasil dari program pemberdayaan masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bertanggungjawab atas pemeliharaan dan keberlangsungan manfaat dari hasil kegiatan tersebut. Dengan adanya pemeliharaan dan kepastian keberlanjutan dari hasil program pengembangan masyarakat turut mendukung sngata keberlanjutan program berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pemeliharaan aset dan hasil program berbasis pemberdayaan masyarakat memberikan peluang keterlibatan masyarakat dalam mengelolah dan memanfaatkan aset program tersebut secara berkesinambungan. Mekanisme pengelolaan secara mandiri oleh masyarakat merupakan bagian dari semangat penguatan masyarakat dalam menjalankan program yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

d. Upaya Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Kemiskinan

Berbagai kebijakan telah dilaksanakan dalam menjaga tingkat kestabilan ekonomi telah berhasil mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,5 % di triwulan pertama pada tahun 2011 (*year on year*) yang sebelumnya sebesar 6,1 % pada tahun 2010 dan 4,5 % tahun 2009. Selanjutnya, pada bulan Pebruari tahun 2011, tingkat pengangguran terbuka telah berhasil diturunkan menjadi 6,8 % yang sebelumnya 7,41 % pada bulan Pebruari tahun 2010. Adnya penurunan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun menunjukkan

pertumbuhan ekonomi telah berhasil meningkatkan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan. Selain kebijakan yang bersifat makro ekonomi, Pemerintah juga telah menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin atau *pro-poor*, melalui 3 (tiga) Klaster Program Pengentasan Kemiskinan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010. Ketiga program tersebut adalah:

- 1) Klaster yang berbasis program bantuan sosial yang mencakup; Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas), beasiswa miskin, program subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan program bantuan sosial lainnya;
- 2) Klaster yang berbasis program pengentasan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mencakup Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri; dan
- 3) Klaster yang berbasis program pengentasan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan UMKM, melalui penyaluran Kredit Untuk Rakyat (KURU) merupakan upaya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga dengan melakukan pemberdayaan masyarakat miskin sehingga masyarakat kapabidan kemandirian untuk terlibat aktif di dalam setiap proses pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung

masyarakat (BLM) melalui kecamatan dan kelurahan untuk menjadi insentif bagi pembangunan modal sosial maupun untuk memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat setempat. Pada tahun 2011, PNPM Mandiri telah menjangkau seluruh kecamatan sebanyak 6.622 kecamatan dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 14,98 triliun, meningkat dari alokasi tahun 2010 yang sebesar Rp 11,41 triliun. Penambahan anggaran dilakukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan PNPM Mandiri melalui pemenuhan BLM bagi lokasi-lokasi PNPM Perdesaan dan Perkotaan, serta untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui usaha ekonomi produktif terutama di kecamatan-kecamatan dengan potensi tenaga kerja Indonesia yang tinggi. Melalui pelaksanaan PNPM Mandiri pada tahun 2010 telah terserap 5,22 juta tenaga kerja dengan jumlah sebesar 66,72 juta hari orang kerja (HOK), sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Kesinambungan pelaksanaan PNPM Mandiri juga sudah dilakukan dengan mulai mengintegrasikan program-program sektoral kedalam PNPM Mandiri Inti sebagai PNPM Penguatan, diantaranya adalah PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, PNPM PUAP, PNPM Pariwisata, PNPM Permukiman, PNPM SANIMAS, PNPM LMP, PNPM Generasi, dan PNPM integrasi (P2SPP). Diharapkan dengan integrasi PNPM Penguatan dengan PNPM Mandiri Inti akan semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program sektoral berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tetap masih mejadi fokus dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan PNPM Mandiri. Perbaikan disain PNPM Mandiri akan dilakukan agar dapat benar-benar menjadi media bagi peningkatan keberdayaan dan kemandirian

masyarakat serta memiliki dampak yang signifikan bagi pengurangan kemiskinan. Sikronisasi dan koordinasi antar sektor juga akan ditingkatkan dan dalam hal ini peran Tim Pengendali PNPM maupun Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Penguatan akan terus dilakukan secara selektif, terutama bagi sektor-sektor yang memiliki program berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga terus melakukan upaya untuk mensinkronkan perencanaan partisipatif dengan perencanaan reguler melalui beberapa kegiatan uji coba yang memberikan gambaran positif. Sehingga diharapkan usulan dari masyarakat dapat diakomodasi dalam perencanaan sektoral di daerah dan pusat. Untuk meningkatkan keberlanjutan dari kelembagaan yang telah terbentuk di tingkat masyarakat, khususnya kelembagaan keuangan di tingkat masyarakat masih perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kelembagaan keuangan mikro lainnya sehingga terjadi kesinambungan program penanggulangan kemiskinan.

3. Kesejahteraan Masyarakat

a. Konsep Kemiskinan

Konsep dan pendekatan kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik adalah ketidakmampuan masyarakat dalam rangka memenuhi standar dari kebutuhan sandang, pangan dan papan (kebutuhan dasar), baik makanan maupun bukan makanan. Standar dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan mendasar tersebut diformulasikan sebagai garis kemiskinan, dimana garis kemiskinan dibatasi dari kemampuan masyarakat memperoleh kebutuhan dasar makanan setara 2100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok (BPS, 1996).

Konsep kemiskinan dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

- 1) Kemiskinan absolut yang dirumuskan dengan ukuran tertentu yang nyata. Ukuran ini umumnya mengacu pada pemenuhan kebutuhan hidup mendasar minimum masyarakat (sandang, pangan dan papan). Konsep kemiskinan absolut memiliki garis batas kemiskinan karena indikatornya atau ukurannya telah dipastikan. Konsep kemiskinan absolut memiliki kelemahan karena indikator yang relative bias. Beberapa pendapat yang muncul menyatakan bahwa tidak memungkinkan membuat satu ukuran untuk setiap anggota masyarakat. Masing-masing daerah dan wilayah memiliki kebutuhan sandang, pangan dan papan yang berbeda. Namun, konsep kemiskinan absolut sangat populer karena bersifat strategis dan menarik dalam merencanakan program-program menurunkan tingkat kemiskinan.
- 2) Konsep kemiskinan relative dirumuskan atas dasar *the idea of relative standard*, yaitu dengan memperhatikan dimensi waktu dan tempat. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa kemiskinan di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Konsep kemiskinan relative biasanya diukur dengan mempertimbangan pada derajat kelayakan hidup.
- 3) Konsep kemiskinan subjektif yang didasarkan perasaan yang muncul dari kelompok miskin itu sendiri. Kelompok miskin tersebut yang ditinjau dari sudut pandang konsep kemiskinan absolut dan relative berada di bawah garis kemiskinan kemungkinan menganggap dirinya miskin dan juga sebaliknya.

b. Dimesi Kemiskinan

Untuk mendekati masalah kemiskinan ada dua macam perspektif yang umum digunakan yaitu:

1) Perspektif kultural

Pendekatan perspektif kultural melihat kemiskinan pada tingkat analisis pada level individual, level keluarga serta level masyarakat. Pada level individual, kemiskinan sifat yang umumnya disebut *a strong feeling of marginality*. Sifat tersebut mencakup sifat parokial, apatisme, pasrah pada keadaan, tingginya pengeluaran, adanya ketergantungan pada orang lain tergantung dan perasaan inferior. Pada level keluarga dicirikan dengan jumlah anggota keluarga yang relatif besar. Pada level masyarakat kemiskinan dicirikan dengan tidak menyatunya kelompok yang dikategorikan miskin dengan pranata-pranata masyarakat. Pada umumnya kelompok-kelompok yang dikategorikan miskin lebih banyak diperlakukan sebagai objek dan bukan sebagai sumbejk yang mampu menentukan sendiri arus kebijakan dalam kehidupannya.

2) Perspektif struktural atau situasional

Pada perspektif struktural atau situasional memandang konsep kemiskinan sebagai efek dari perkembangan sistem ekonomi yang lebih berpihak pada kepemilikan modal yang dinilai cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi tetapi tidak mementingkan pemerataan dari hasil pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Suharto (2006 : 148 – 149) menyatakan tiga kategori kemiskinan yang menjadi ruang lingkup pekerjaan sosial, yaitu:

- 1) Kelompok yang paling miskin (*destitute*) atau fakir miskin. Kelompok ini secara nyata memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan dan tidak sumber pendapatan. Kelompok ini juga masih belum memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
- 2) Kelompok miskin (*poor*) memiliki pendapatan namun masih di bawah garis kemiskinan serta adanya akses terhadap pelayanan sosial dasar.
- 3) Kelompok rentan (*vulnerable group*). Pada kelompok ini dikategorikan lewat dari garis kemiskinan dan memiliki taraf kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang paling miskin dan kelompok miskin. Sesuai dengan kategorinya, kelompok ini masih rentan dalam perubahan status ke tingkat yang lebih rendah yang dikarenakan permasalahan ekonomi.

Munculnya kemiskinan subyektif dikarenakan individu masih belum membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kemiskinan absolut merupakan kondisi di mana individu atau keluarga memiliki sumber penghasilan, namun masih belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan minimumnya sehari-hari secara efisien. Konsep kemiskinan berhubungan dengan ketimpangan pendapatan yang berimplikasi pada kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan mendasar (sandang, pangan dan papan)

Konsep kemiskinan absolut sebagian besar digunakan dalam program pengentasan kemiskinan yang digerakkan oleh pemerintah pada sektor pelayanan dasar. Salah satu

indikator pengukuran tingkat kemiskinan masyarakat dengan memanfaatkan data pendapatan dan pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendasar (sandang, pangan dan papan).

Badan Pusat Statistik (2008) menetapkan lagi delapan variabel sebagai indikator untuk menentukan tingkat kemiskinan masyarakat pada level rumah tangga miskin, sebagai berikut: 1) Luas lantai per-kapita, 2) Jenis lantai, 3) ketersediaan air bersih, 4) Jenis jamban, 5) Kepemilikan aset, 6) Pendapatan per-bulan, 3) Pengeluaran untuk makanan, dan 6) Konsumsi lauk pauk.

Pendekatan pemerintah dalam menggunakan konsep kemiskinan absolut pada program-program pengentasan kemiskinan dinilai mampu diukur dampak ataupun output dalam rentang waktu tertentu. Hasil dari output tersebut digunakan sebagai bahan referensi dalam pengembangan program lanjutan pengembangan masyarakat. Bank Dunia juga menggunakan pendekatan kemiskinan absolut dengan membandingkan angka kemiskinan dibebagai negara. Dengan pendekatan ini, Bank Dunia mampu memposisikan bantuan sesuai dengan pendekatan data tersebut.

BPS (2008) mengemukakan konsep kemiskinan relatif sebagai suatu situasi individu atau kelompok di kategorikan miskin karena pengaruh akan kebijakan pembangunan secara umum masih belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan distribusi pendapatan. Konsep kemiskinan relatif yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik cenderung mengarah pada adanya kesenjangan

pendapatan dan pengeluaran antar daerah pada atau antar negara. Pendekatan konsep kemiskinan relatif memiliki perbedaan antara BPS dan konsep yang dikemukakan oleh Supadi dan Akhmad Rozany. BPS memiliki kecenderungan lebih subketif dan sejalan dengan indikator yang ditentukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan, sedangkan Supadi dan Akhmad Rozany memiliki kecenderungan lebih obyektif yaitu tingkat kesejahteraan individu dibandingkan dengan individu lain dalam suatu daerah. Suparlan dalam Masjkuri (2007 : 40 – 41) menyatakan;

“kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin”.

Konsep kemiskinan yang dinyatakan Suparlan memandang kemiskinan sebagai suatu situasi relatif pada individu tertentu atau pada atau sekelompok individu yang berada dalam suatu daerah. Perbedaan status sosial dan ekonomi masyarakat turut dipertimbangkan dalam konsep kemiskinan tersebut.

Dari beberapa konsep kemiskinan di atas menunjukkan hubungan hubungan antara konsep kemiskinan yang bersifat relatif dan konsep kemiskinan yang bersifat subyektif. Adanya pemahaman dari individu dan kelompok yang menyatakan kondisinya miskin dengan membandingkan dengan individu dan kelompok lain. Pendekatan ini relatif bias karen tidak memperhitungkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini juga

berlaku sebaliknya dengan menyatakan pihak lain miskin dengan membandingkan keadaan dirinya (individu maupun kelompok) dengan individu dan kelompok lainnya.

Kondisi kemiskinan baik secara individu atau kelompok cenderung memiliki motivasi dan keinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Namun, pada situasi lain sebagian individu atau kelompok tidak merasa miskin atau menganggap hal situasi tersebut sebagai suatu hal yang biasa. Sikap dari individu dan kelompok tersebut oleh Taylor (2007) disebut sebagai 'kondisi membiasanya penderitaan'. Taylor mengatakan bahwa :

“Pola hidup sederhana ada dalam komunitas-komunitas yang agak stabil dan lebih kuat, bahkan pola itu semakin meningkat. Lingkungan tempat mereka lahir dan bertumbuh, dalam banyak hal, lebih mudah dihadapi daripada kebudayaan baru yang perlu penyesuaian bahkan mungkin mengkhawatirkan. Ciri pokok “kondisi membiasanya penderitaan” dalam suatu lingkungan adalah bahwa kondisi tersebut sangat sulit disadari oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Dengan demikian, apa yang tampak dari luar sebagai kondisi hidup yang mengerikan, oleh orang-orang yang berada di dalam, dilihat sebagai realitas hidup harian yang tidak menutup kemungkinan bagi berkembangnya rasa senang atau kepuasan”.

Kemiskinan yang digambarkan oleh Taylor menunjukkan bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak menyadari kemiskinan yang dialaminya sebagai suatu masalah. Sekalipun mereka memandang kemiskinan sebagai suatu masalah tetapi tidak berupaya untuk mengatasi masalah dan keluar dari kondisi miskin yang memerangkap dirinya. Kondisi membiasanya penderitaan dan perangkap kemiskinan sebagaimana digambarkan Taylor utamanya dapat dilihat pada kelompok-kelompok yang secara turun temurun selalu berada dalam stratifikasi sosial paling bawah. Kelompok masyarakat seperti ini memiliki kecenderungan menerima kemiskinan sebagai nasib. Kelompok masyarakat ini

tidak menangkap peluang dalam perkembangan dan pembangunan di sekitarnya dan selalu takut memulai hal baru.

c. Penanganan Masalah Kemiskinan

Strategi dan pendekatan dalam menangani kemiskinan ditentukan pada pendekatan yang diterapkan dalam rangka memahami akar permasalahan kemiskinan. Penanganan masalah kemiskinan akan dilihat sebagai suatu aktivitas pemberdayaan dan penguatan masyarakat itu sendiri.

Apabila permasalahan kemiskinan berhubungan dengan faktor kultural, maka strategi pengentasan kemiskinan lebih menekankan peningkatan etos kerja kelompok yang dikategorikan miskin, peningkatan dan pemanfaatan layanan pendidikan untuk membentuk pola pikir yang visioner dan menata kembali pranata-pranata masyarakat dalam mewadahi kebutuhan dan aspirasi kelompok miskin.

Upaya pembangunan masyarakat akan lebih dititik beratkan pada peningkatan kualitas manusianya sehingga dapat berfungsi lebih efektif dalam upaya peningkatan taraf hidup. Peningkatan kualitas ini akan memungkinkan peningkatan kemampuan dalam mengantisipasi berbagai peluang yang muncul serta peningkatan kemampuan dan produktifitas kerja.

Apabila permasalahan kemiskinan berhubungan pada masalah struktural, perencanaan strategi pembangunan tidak lagi mementingkan pertumbuhan ekonomi namun lebih pada pemerataan kesempatan. Diperlukannya reformasi pada sistem dan struktural yang pada akhirnya menciptakan distribusi penguasaan sumber daya yang lebih merata.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Adolf b. Heatubunl dan Bonar M. Sinaga Universitas Pattimura Ambon dan Institut Pertanian Bogor	Pemberdayaan dan Kegiatan Petani Multikomoditi di Pedesaan Propinsi Maluku: Suatu Kajian Ekonomi Rumahtangga	Pemberdayaan Petani dan Kegiatan Petani Multikomoditi	Penerapan program pemberdayaan kepada petani multikomoditi berhasil dilihat dari sisi tepat sasaran, sesuai agroekosistem setempat, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan produksi dan pendapatan petani
2	Dwi Prawani Sri Rejeki (2006)	Analisis Penanggulangan Kemiskinan melalui Implementasi Program P2kp di Kota Semarang (Studi Kasus Di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2000 - 2003)	Variabel pendampingan (X1) Variabel pinjaman modal (X2) Variabel pendapatan usaha (X3) Variabel simpanan usaha (Y).	Menunjukkan telah terjadi peningkatan (dalam kurun waktu 6 bulan sebelum dan sesudah program) yang berarti meningkatkan pendapatan sesudah program
3	Muhammad Syukri, Sultan Mawardi dan Akhmadi (Lembaga Penelitian SEMERU)	Studi Kualitatif Dampak PNPM Pedesaan di Provinsi Jawa Timur, Sumatera barat, dan Sulawesi Tenggara	Evaluasi kegiatan PNPM Isu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas	PNPM memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kemiskinan di wilayah sampel.

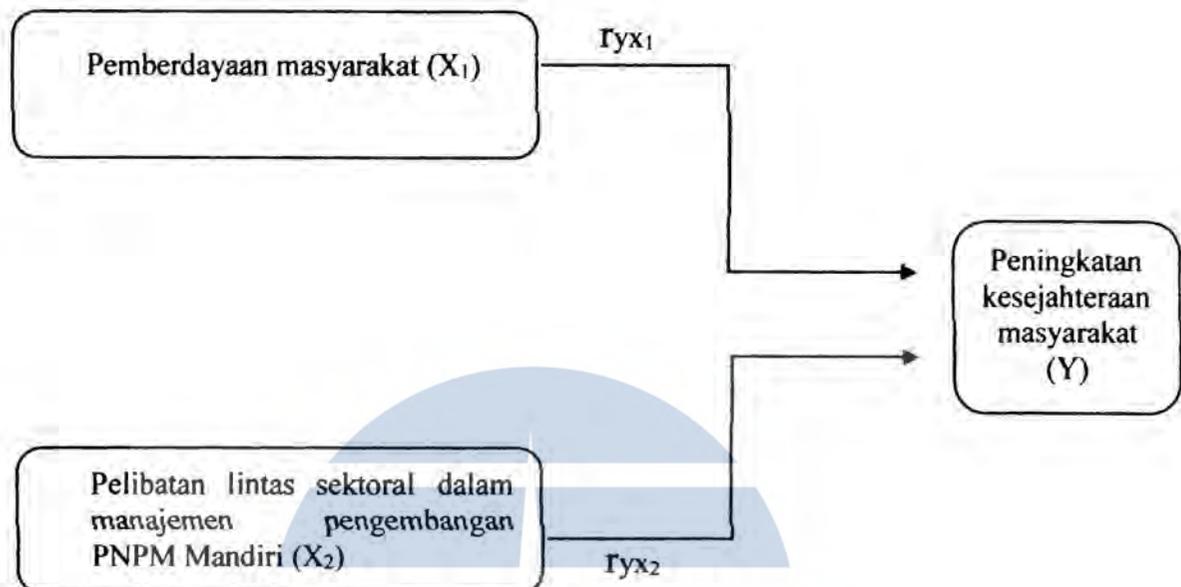
	(2013)			
4	Nano Prawoto (prawotonano@yahoo.com) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2012)	Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah)	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Pangan	Penelitian mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kemandirian untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat Dieng di provinsi Jawa Tengah
5	John Robets (2003)	Poverty Reduction Outcomes in Education and Health: Public Expenditure and Aid	Health Outcomes, Public Expenditure, per capita GDP, income distribution, water & sanitation, rural/urban, female education, vaccination rates, socio-cultural Variables.	Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dengan pemenuhan fasilitas dasar akan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin, berpengaruh positif terhadap tingkat kematian anak.
6	Shenggen Fan, Peter Hazell and Sukhadeo Thorat (2000)	Government Spending, Growth and Poverty in Rural India	Government Spending, Growth and Poverty in Rural India	Peningkatan infrastruktur di pedesaan miliki kontribusi yang baik terhadap penurunan penduduk miskin di pedesaan, namun kontribusi lebih besar di berikan dari sektor pertanian.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang mencari pengaruh tiap variabel dengan variabel yang lain. Pemberdayaan masyarakat dalam manajemen PNPM Mandiri sebagai variabel X_1 mencakup kemampuan masyarakat menjelaskan potensi yang ada dan cara menggunakannya, kemampuan masyarakat mengetahui apa yang sudah dilakukannya dan apa yang sudah dicapainya, kemampuan masyarakat mampu membangun visi, analisa masalah, identifikasi isu dan mampu memecahkan masalah, kemampuan masyarakat merumuskan tujuan, sasaran, hasil, kegiatan, dana dan waktu, kemampuan masyarakat mempunyai rencana sendiri untuk memelihara dan mengembangkan kegiatan yang telah ada, kemampuan masyarakat mengetahui apa yang dapat dilakukan dan dukungan apa yang dibutuhkan dari pihak luar, kemampuan masyarakat berkerja sama berdasarkan peran spesifik dari masing-masing pemangku kepentingan, kemampuan masyarakat menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru dari kerjasama dengan pemangku kepentingan. Pelibatan lintas sektoral sebagai variabel X_2 mencakup keterlibatan pemerintah dalam tahap sosialisasi, keterlibatan pemerintah tahap pelaksanaan program, keterlibatan pemerintah dalam tahap pengendalian, dan keterlibatan pemerintah.

Kedua variabel x tersebut akan dianalisis untuk melihat sejauh mana pengaruhnya pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat (variabel y) khususnya pada lingkup kemiskinan dengan acuan kondisi hunian, perasaan, kesehatan dan gizi, lingkungan sosial, infrastruktur dan layanan, lingkungan alam, lingkungan politik, tingkat pengetahuan, lingkungan ekonomi dan kepemilikan aset.

Hubungan variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

- H_1 : Pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan dalam pengembangan manajemen PNPM Mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
- H_2 : Pelibatan lintas sektoral berpengaruh signifikan dalam pengembangan manajemen PNPM Mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
- H_3 : Pemberdayaan masyarakat dan pelibatan lintas sektoral secara bersama-sama berpengaruh signifikan dalam pengembangan manajemen PNPM Mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode korelasional yang bertujuan mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih indikator lain berdasarkan koefisien korelasi. Data yang diperoleh di lapangan dianalisis secara kuantitatif berdasarkan informasi indikator maupun kualitatif berdasarkan penafsiran terhadap hasil-hasilnya. Dengan menggunakan metode korelasional, diharapkan memperoleh kesimpulan yang mungkin dapat diangkat ke taraf generalisasi berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data. Kemudian dari kesimpulan dan generalisasi itu akan ditarik implikasi yang bermakna untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan himpunan keseluruhan objek penelitian atau sebagai keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu (Sedarmayanti, Syarifudin: 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pendapat pelaku utama PNMP Mandiri Pedesaan. Sesuai dengan Petunjuk teknis operasi PNPM Mandiri, masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing agar tujuan,

prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku yang terlibat dalam manajemen PNPM Mandiri yaitu masyarakat kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dan Pemerintah Kecamatan Alo'oa.

Sesuai dengan data dari BPS Kota Gunungsitoli, Jumlah penduduk Kecamatan Gunungsitoli Alo'a per tahun 2013 berjumlah 6.878 orang.

Tabel 3.1
Penyebaran Populasi

No	Desa	Jumlah penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Fadoro You	385	392	777
2	Nazalou Alo'oa	500	590	1090
3	Niko'otano Dao	625	751	1376
4	Nazalou Lolowua	571	649	1220
5	Lololawa	141	145	286
6	Orahili Tanose'o	166	184	350
7	Tarakhaini	274	267	541
8	Fadoro Hilimbowo	170	205	375
9	Iraono Lase	433	430	863
Total		3265	3613	6878

Sumber Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli_ <http://gunungsitolikota.bps.go.id>

2. Sampel

Sample adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Cooper & Emory, 1999). Sampel diperoleh dari pelaku utama PNPM Mandiri di tingkat desa. Pelaku utama di tingkat desa terdiri dari Kepala desa, BPD, Tim Pengelolah Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pemantau, Tim Pemelihara, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan kelompok Masyarakat di lingkungan kecamatan Gunungsitoli Alo'oa. Sampel tersebar di enam desa binaan PNPM Mandiri seperti pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Penyebaran Sampel Penelitian

No	Pelaku	Jumlah
1	Kepala Desa	9
2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	45
3	Tim Pengelolah Kegiatan (TPK)	18
4	Tim Penulis Usulan (TPU)	18
5	Tim Pemantau	108
6	Tim Pemelihara	30
7	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	18
8	Kelompok Masyarakat	3
Jumlah		249

Sumber: Kantor Camat Gunungsitoli Alo'oa

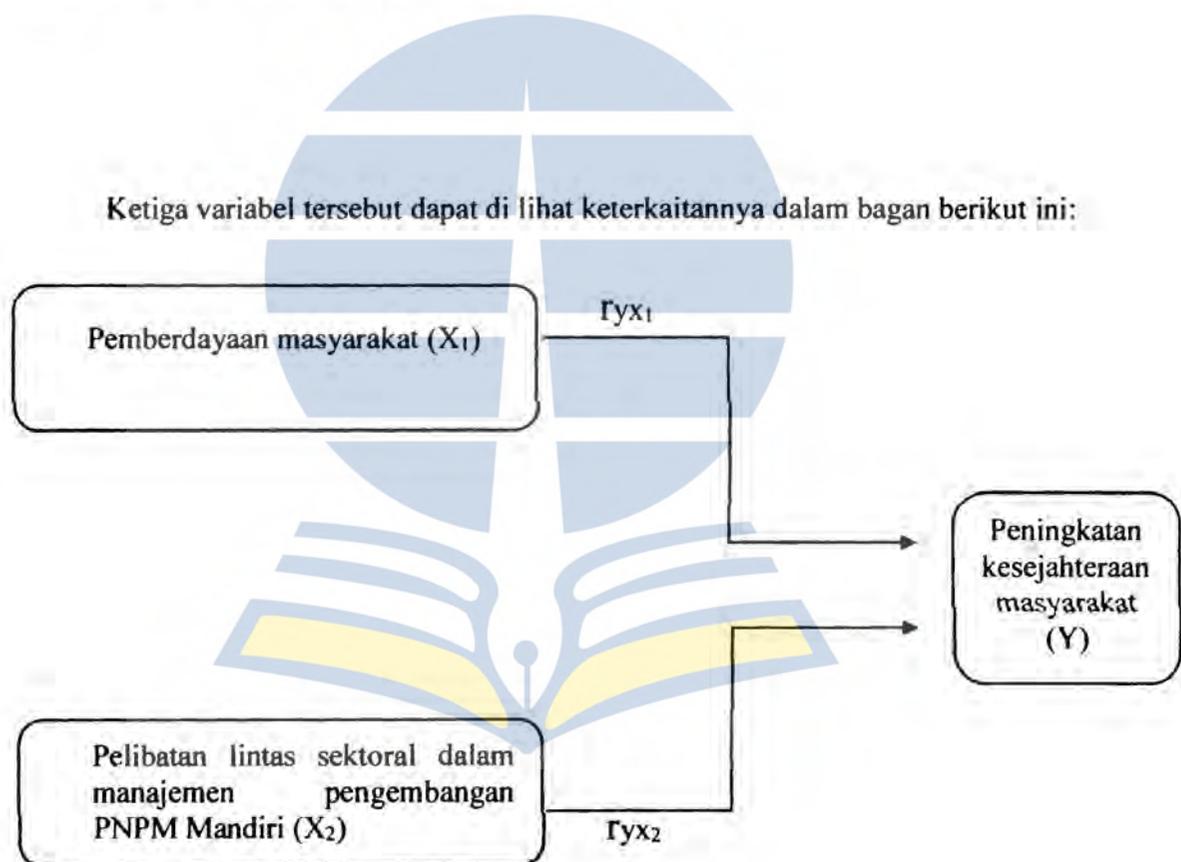
C. Variabel Penelitian

Menurut Suryabrata (2003:25) yang menyatakan bahwa indikator adalah sesuatu objek yang akan diteliti atau dapat diartikan sebagai indikator-faktor yang berperan dalam

peristiwa ataupun gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, terdapat tiga gejala yang berperan yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam manajemen pengembangan PNPM Mandiri (X_1)
2. Pelibatan lintas sektoral dalam manajemen pengembangan PNPM Mandiri (X_2)
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y).

Ketiga variabel tersebut dapat di lihat keterkaitannya dalam bagan berikut ini:



Gambar 3.1.
Variabel Penelitian

D. Instrumen Penelitian

1. Alat Pengumpulan Data

Menurut Riduwan (2004:99), “Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respons (responden)”. Pendapat tersebut sejalan dengan populasi dan sampel penelitian ini yaitu pendapat pelaku utama PNPM Mandiri. Dalam memperoleh pendapat sampel, peneliti menyiapkan angket sesuai dengan indikator yang diteliti.

2. Kisi-kisi Angket

Jenis skala pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan variabel penelitian yang akan diukur dalam menentukan analisis data menggunakan skala interval yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama.

Penyusunan angket didasarkan indikator penelitian yang diperjelas dengan indikator penelitian. Penilaian angket menggunakan tipe pengukuran skala Guttman dengan dua interval berupa skor tertinggi bernilai (1) dan skor terendah bernilai (0).

Tabel 3.3
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Variabel Penelitian	Definisi Konseptual variabel	Dimensi kajian	Indikator	Butir soal
Pemberdayaan masyarakat (X1)	Upaya untuk mengembangkan potensi dan daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan bukan hanya menguatkan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya, dengan cara menawarkan nilai-nilai budaya	Dimensi Kontribusi Masyarakat	Kontribusi Pemikiran	1
			Kontribusi Tenaga	2
			Kontribusi Dana	3
		Dimensi Pengorganisasian Masyarakat	Model Pengorganisasian,	4,5
			Peran Masyarakat	6,7
			Aksi Masyarakat	8
		Dimensi Pemberdayaan Masyarakat	Motivasi Masyarakat	9
			Tanggungjawab Masyarakat	10
			Sosialisasi	11
			Musyawaharah Desa (Mudes) Sosialisasi	
Pelibatan Lintas Sektoral dalam pengembangan Manajemen PNPMD Mandiri (X2)	interfensi pemerintah untuk mendorong masyarakat agar terlibat dalam kegiatan manajemen pengembangan PNPMD Mandiri	Dimensi keterlibatan dalam tahap sosialisasi	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	12
			Penggalan Gagasan	13
			Musyawaharah Desa Khusus Perempuan (MKP)	
			Mudes Perencanaan	14
			Penulisan Usulan Desa	
			Verifikasi Usulan	15
			MAD Prioritas	
			Usulan	16
			Musyawaharah Antar Desa (MAD)	
			Penetapan Usulan	17
			Mudes	
			Informasi Hasil MAD	18
			Pengesahan Dokumen SPPB	19
Dimensi keterlibatan dalam	Persiapan Pelaksanaan	20		

		tahap pelaksanaan program	Pelaksanaan	21	
			Mudes	22	
			Pertanggungjawaban	23	
			Sertifikasi	24	
			Revisi Kegiatan	25	
		Dokumentasi Kegiatan	26		
		Dimensi keterlibatan dalam tahap pengendalian		Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah	27
				Pemantauan dan Pemeriksaan Berjenjang	28
				Pemantauan oleh Pihak Lain	29
				Audit dan Pemeriksaan Keuangan	30
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Upaya pembangunan masyarakat akan lebih dititik beratkan pada peningkatan kualitas manusianya sehingga dapat berfungsi lebih efektif dalam upaya peningkatan taraf hidup. Peningkatan kualitas ini akan memungkinkan peningkatan kemampuan dalam mengantisipasi berbagai peluang yang muncul serta peningkatan kemampuan dan produktifitas kerja	Dimensi keluarga Sejahtera	Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.	31	
			Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian	32	
			Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.	33	
			Bila anak atau anggota keluarganya yang lain sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan	34	
			Sekurang-kurangnya sekali seminggu keluarga menyediakan daging atau ikan atau telur sebagai lauk pauk.	35	
			Paling kurang satu orang anggota keluarga yang berumur 17 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap	36	

			Seluruh anak berusia 6-15 tahun saat ini (waktu pendataan) bersekolah	37
			Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga	38
			Memperoleh berita dengan membaca surat kabar, majalah, mendengarkan radio atau menonton televisi	39
			Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial dalam bentuk materi.	40

3. Validitas dan Reliabilitas

Instrumen yang akan digunakan untuk penelitian diuji cobakan terlebih dahulu di lokasi lain yang memiliki sifat yang *relative* sama dengan lokasi penelitian. Instrumen yang valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dan instrumen yang *reliable* berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2009:173). Pengujian validasi dan reliabilitas dilaksanakan di Kecamatan Gunungsitoli Utara yang juga memiliki program pembedayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri.

a. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005). Dalam hal ini digunakan beberapa butir pertanyaan yang dapat secara tepat mengungkapkan variabel yang diukur tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan validitas eksternal dimana instrumen di uji dengan membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan (Situmorang dan Lufti 2014:88). Instrumen setiap variabel dinyatakan valid dengan membandingkan nilai *Corrected Item-Total Correlation* dengan r_{tabel} (0,254). Uji validitas dilaksanakan di kecamatan Gunungsitoli Utara dengan jumlah responden sebanyak 64 orang. Alasan utama pemilihan lokasi uji coba karena kecamatan Gunungsitoli Utara memiliki kesamaan sifat dengan lokasi penelitian (kecamatan Gunungsitoli Alo'oa). Program PNPM Mandiri beserta struktur dan prosedur pelaksanaan operasinya identik sama dengan kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.

1) Validitas Variabel Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 3.4
 Hasil Perhitungan Validitas Variabel Pemberdayaan Masyarakat
 Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item1	34,5625	24,345	,303	,782
item2	34,3906	24,210	,325	,778
item3	34,3750	24,683	,318	,777
item4	34,1563	23,182	,662	,736
item5	34,5000	24,349	,364	,771
item6	34,1563	23,182	,662	,736
item7	34,1563	23,182	,662	,736
item8	34,1563	23,182	,662	,736
item9	34,6406	24,234	,342	,775
item10	34,4531	24,569	,397	,766

Berdasarkan Tabel 3.4, diketahui bahwa semua pernyataan yang digunakan dalam kuisioner untuk variabel pemberdayaan masyarakat dinyatakan valid, karena dari semua item pertanyaan mempunyai nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari r_{tabel} (0,254)

2) Pelibatan Lintas Sektoral

Tabel 3.5
 Hasil Perhitungan Validitas Variabel Pelibatan Lintas Sektoral
 Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item11	72,7813	82,396	,644	,867
item12	72,9219	84,740	,300	,879
item13	72,6250	81,032	,665	,866
item14	72,5938	86,436	,291	,878
item15	72,7813	82,396	,644	,867
item16	72,7656	81,833	,510	,871
item17	72,9375	85,869	,295	,878

item18	72,7344	84,547	,379	,875
item19	72,6563	80,166	,729	,864
item20	72,7813	82,396	,644	,867
item21	72,7969	82,260	,442	,874
item22	72,6250	80,905	,674	,866
item23	72,6094	84,305	,361	,876
item24	72,8750	82,492	,627	,868
item25	72,6406	83,535	,470	,872
item26	72,8906	85,432	,326	,877
item27	72,7344	84,897	,340	,877
item28	72,6875	82,377	,574	,869
item29	72,7969	85,244	,310	,878
item30	72,7500	80,444	,654	,866

Berdasarkan tabel 3.5, diketahui bahwa semua pernyataan yang digunakan dalam kuisioner untuk variabel pemberdayaan masyarakat dinyatakan valid, karena dari semua item pertanyaan mempunyai nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari r_{tabel} (0,254)

3) Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 3.6
Hasil Perhitungan Validitas Variabel Kesejahteraan Masyarakat
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item31	34,3594	21,472	,306	,758
item32	34,2031	22,482	,368	,743
item33	34,3594	22,012	,316	,752
item34	34,5938	21,261	,538	,722
item35	34,3750	22,048	,356	,745
item36	34,6250	21,794	,380	,742
item37	34,3594	21,281	,486	,728
item38	34,3906	20,813	,571	,717
item39	34,4375	21,425	,420	,736
item40	34,4063	20,848	,529	,721

Berdasarkan tabel 3.6, diketahui bahwa semua pernyataan yang digunakan dalam kuisisioner untuk variabel pemberdayaan masyarakat dinyatakan valid, karena dari semua item pertanyaan mempunyai nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari r_{tabel} (0,254)

b. Uji reliabilitas tes

Menurut Nasution (2001:77), suatu alat pengukur dikatakan reliabel bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama.

Perhitungan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus *Alpha Cronbach*. Kriteria instrumen yang reliabel apabila nilai koefisien Alpha sekurang-kurangnya 0,70 sebagai batas terendah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan aplikasi *SPSS for Windows*. Hasil pengujian reliabilitas instrumen terangkum dalam Tabel 3.7:

Tabel 3.7
Perhitungan Reliabilitas tiap Variabel
Reliability Statistics

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Pemberdayaan Masyarakat	,778	10
Pelibatan Lintas Sektoral	,877	20
Kesejahteraan Masyarakat	,757	10

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2015 sampai April 2015.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian direncanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menyusun dan mempersiapkan alat pengumpul data tentang pemberdayaan masyarakat dan lintas sektoral dalam manajemen pengembangan PNPM Mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Melakukan uji coba instrument untuk menguji validasi dan reliabilitas instrument.
3. Mendistribusikan instrument kepada sample penelitian secara langsung.
4. Mengumpulkan instrument yang telah diisi oleh responden.

G. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk menguji hipotesis penelitian dengan tahapan

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas (Ghozali, 2005). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Dalam membantu pendeteksian ada atau

tidaknya multikolinearitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengikuti acuan asumsi deteksi sebagai berikut:

- a) Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2005).
- b) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Apabila antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas (Ghozali, 2005).
- c) Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF). kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2005).

Apabila ketiga asumsi deteksi di atas tidak ditemukan dalam perhitungan model regresi, maka dapat disimpulkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas, dan apabila hasil perhitungannya menunjukkan asumsi deteksi diatas, maka dapat disimpulkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini belum bebas dari multikolinearitas,.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedstisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

Untuk untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di *studentized* akan mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau setidaknya mendekati normal (Ghozali, 2005). Penyebaran data yang erupa titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan cara melihat histogram dari residualnya menunjukkan distribusivariable normal atau tidak..

4. Menghitung Koefisien Korelasi Regresi Linear Berganda

$$Y = b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Keterangan:

Y = Kesejahteraan Masyarakat

b₁, b₂ = koefisien garis regresi

X1 = Pemberdayaan Masyarakat

X2 = Pelibatan Lintas Sektoral

Sudjana, Ibrahim (1989:159)

5. Uji hipotesis

Uji hipotesis dengan menggunakan uji F yaitu Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah:

- H₁ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan manajemen PNPM Mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
- H₂ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelibatan lintas sektoral dalam pengembangan manajemen PNPM Mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
- H₃ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberdayaan masyarakat dan pelibatan lintas sektoral dalam pengembangan manajemen PNPM Mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis adalah dengan menggunakan acuan angka probabilitas signifikansi, sebagai berikut:

- a. Apabila hasil perhitungan menunjukkan probabilitas signifikansi > 0.05 , maka H₀ diterima dan H_a ditolak.

b. Apabila hasil perhitungan menunjukkan probabilitas signifikansi < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

(Ghozali, 2005)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Geografis

Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa adalah salah satu kecamatan di Kota Gunungsitoli yang mempunyai luas sekitar 60,21 km², dimana desa terluas di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa adalah desa Nazalou Lolowua yang mempunyai luas sekitar 11,84 km² atau sekitar 19,66% dari luas Kecamatan, sedangkan desa yang luasnya paling kecil adalah desa Orahili Tanose'o yang mempunyai luas sekitar 1,84 km² atau sekitar 3,06% dari luas Kecamatan.

Secara geografis kecamatan Gunungsitoli Alo'oa berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Utara di sebelah utara, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Utara di sebelah selatan, Kabupaten Nias Utara di sebelah barat, dan Kecamatan Gunungsitoli di sebelah timur.

Rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2013 tercatat berkisar antara 21,80C sampai 33,10C. Sementara untuk itu curah hujan juga relatif tinggi yaitu 245,94 mm/bulan dengan kelembaban udara mencapai 88 %. Kondisi alam/topografi wilayah Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, yaitu berbukit-bukit, berlereng, datar dan mengandung batuan kapur, sehingga kondisi air tanah juga mengandung kapur.

Tabel 4.1
Letak dan Batas Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Tahun 2013

1	Letak	Lintang	1015'0" LU - 1015'0" LU
		Bujur	97030'0" BT - 97035'0" BT
2	Luas Wilayah		± 60,21 km ²
3	Letak di Atas Permukaan Laut		± 160-400 m
4	Jarak Kantor Camat ke Kantor Walikota		14 km

Sumber Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli_ <http://gunungsitolikota.bps.go.id>

2. Pemerintahan

Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa terdiri dari sembilan (9) desa dan terbagi menjadi 30 dusun. Desa/kelurahan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis desa, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Klasifikasi ke tiga jenis desa ini dilihat dari kemajuan dan pencapaian desa pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, sosial budaya, serta kedaulatan politik masyarakatnya. Dari sembilan (9) desa di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, semuanya (100%) tergolong klasifikasi desa swakarya.

Suatu desa diklasifikasikan sebagai Desa Swadaya bila tingkat kemajuan indikator tersebut di atas di bawah tingkat kemajuan kabupaten/kota dan nasional. Desa yang termasuk Desa Swakarya bila tingkat kemajuan indikator tersebut sama atau lebih besar bila dibanding tingkat kemajuan di kabupaten/kota tetapi lebih rendah bila dibanding dengan nasional, dan desa yang termasuk klasifikasi Desa Swasembada apabila tingkat kemajuan indikator tersebut, sama atau lebih besar dengan kemajuan tingkat nasional.

Dalam hal administrasi dan untuk kelancaran tugas pemerintahan desa, seorang kepala desa dibantu oleh seorang sekretaris desa. Dimana untuk Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dipimpin oleh Kepala Desa dan sekretaris desa. Untuk sekretaris desa, ada

sebanyak 4 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni desa Nikootano Dao, Nazalou Lolowua, Fadoro Hilimbowo dan Iraonolase. Tingkat pendidikan kepala desa di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa 66,67% atau 6 desa adalah tamatan SMU/Sederajat dan 33,33% atau sebanyak 3 desa adalah tamatan SMP/Sederajat.

Tabel 4.2
Klasifikasi Desa di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Tahun 2013

No	Nama Desa	Swadaya	Swakarya	Swasembada
1	Fadoro You		1	
2	Nazalou Alooa		1	
3	Nikootano Dao		1	
4	Nazalou Lolowua		1	
5	Lololawa		1	
6	Orahili Tanoseo		1	
7	Tarakhaini		1	
8	Fadoro Hilimbowo		1	
9	Iraono Lase		1	
Jumlah			9	

Sumber Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli_ <http://gunungsitolikota.bps.go.id>

3. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa pada tahun 2013 berdasarkan Angka Proyeksi penduduk pertengahan tahun 2013 adalah 6.878 jiwa yang terdiri dari 3.266 penduduk laki-laki dan 3.612 penduduk perempuan dengan luas wilayah mencapai 60,21 Km². Kepadatan Penduduk Kecamatan Gunungstoli Alo'oa Tahun 2013 berdasarkan angka Proyeksi adalah sebesar 114 jiwa per Km². Bila ditinjau per desa, kepadatan penduduk terbesar ada pada desa Nikootano Dao yaitu sebesar 123 jiwa per km². Sex ratio Kecamatan

Gunungsitoli Alo'oa adalah sebesar 90, yang artinya 90 penduduk laki-laki didampingi oleh 100 penduduk perempuan. Sex ratio tertinggi berada di desa Tarakhaini sebesar 103 yang artinya di desa tersebut 103 penduduk laki-laki didampingi oleh 100 penduduk perempuan.

Tabel 4.3

Luas Wilayah, Rasio terhadap Luas, Jumlah Penduduk dan Rasio Sex di kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Tahun 2013

No	Nama Desa	Luas (Km ²)	Rasio Terhadap Luas Kecamatan (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Penduduk (jiwa)	Ratio sex
1	Fadoro You	11,25	18,68	69	385	392	777	98
2	Nazalou Aloo	7,48	12,42	145	500	590	1090	85
3	Nikootano Dao	11,14	18,50	123	625	751	1376	83
4	Nazalou Lolowua	11,84	19,66	103	571	649	1220	88
5	Lololawa	5,48	9,10	52	141	145	286	97
6	Orahili Tanoseo	1,84	3,06	190	166	184	350	90
7	Tarakhaini	1,89	3,14	286	274	267	541	103
8	Fadoro Hilimbowo	5,61	9,32	66	170	205	375	83
9	Iraono Lase	3,68	6,110	234	433	430	863	101
Jumlah		60,21	100	1268	3265	3613	6878	90

Sumber Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli_ <http://gunungsitolikota.bps.go.id>

4. Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Upaya pembangunan sektor pendidikan di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan dan memajukan aspek kualitas pendidikan dan juga tingkat partisipasi sekolah di setiap jenjang pendidikan. Untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdapat 4 PAUD, tingkat Tamat Kanak-Kanak (TK) tidak ada, tingkat Sekolah Dasar (SD) terdapat 10 sekolah namun yang terdaftar di UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa hanya 9 sekolah dimana 1 sekolah yang berlokasi di desa Fadoro You terdaftar di UPTD Pendidikan Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias. Jumlah total siswa Sekolah Dasar di kecamatan Gunungsitoli Alo'oa 1.226 orang.

Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 3 sekolah yang semuanya berstatus negeri, dengan jumlah total siswa 313 orang. Keberadaan gedung sekolah berlokasi di Desa Nazalou Alo'oa, Lololawa, dan Nazalou Lolowua. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat 1 sekolah berstatus Negeri dengan jumlah total siswa 159 orang. Keberadaan gedung SMK terletak di desa Nazalou Alo'oa

Tabel 4.4
Keberadaan Gedung Sekolah di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa

No	Desa	PAUD Negeri	PAUD Swasta	TK Negeri	TK Swasta	SD Negeri	SD Swasta	SMP negeri	SMP Swasta	SMK Negeri
1	Fadoro You					1				
2	Nazalou Aloo		1			1		1		1
3	Nikootano Dao					2				
4	Nazalou Lolowua		1			1		1		
5	Lololawa					1		1		
6	Orahili Tanoseo		1			1				
7	Tarakhaini					1				
8	Fadoro Hilimbowo									
9	Iraono Lase		1			1				
		0	4	0	0	9	0	3	0	1

Sumber Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli_ <http://gunungsitolikota.bps.go.id>

Tabel 4.5
Keadaan Siswa di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa

No	Desa	Jumlah Murid SD Negeri	Jumlah Murid SMP Negeri	Jumlah Siswa SMK Negeri
1	Fadoro You	87		
2	Nazalou Aloo	202	165	159
3	Nikootano Dao	213		
4	Nazalou Lolowua	282	114	
5	Lololawa	86	34	
6	Orahili Tanoseo	124		
7	Tarakhaini	103		
8	Fadoro Hilimbowo			
9	Iraono Lase	129		
		1226	313	159

Sumber Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli_ <http://gunungsitolikota.bps.go.id>

Tabel 4.6
Keadaan Guru di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa

No	Desa	Jumlah Guru SD Negeri	Jumlah Guru SMP	Jumlah Guru SMK Negeri
1	Fadoro You	4		
2	Nazalou Aloo	10	4	5
3	Nikootano Dao	8		
4	Nazalou Lolowua	5	1	
5	Lololawa	7	2	
6	Orahili Tanoseo	10		
7	Tarakhaini	7		
8	Fadoro Hilimbowo	4		
9	Iraono Lase			
		55	7	5

Sumber Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli_ <http://gunungsitolikota.bps.go.id>

Tabel 4.7
Keadaan Sarana Kesehatan di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa

No	Desa	Puskemas	Pustu	Praktik Dokter	Praktik Bidan	Praktik Perawat	Poskedes	Posyandu	Polindes	Dokter	Bidan
1	Fadoro You						1	1			1
2	Nazalou Aloo						1	1			
3	Nikootano Dao	1	1					1			3
4	Nazalou Lolowua				1		1	1			1
5	Lololawa						1	1			1
6	Orahili Tanoseo					1	1	1			1
7	Tarakhaini						1	1			2
8	Fadoro Hilimbowo						1	1			
9	Iraono Lase						1	1			
	Jumlah	1	1	0	1	1	8	9	0	0	9

Sumber Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli_ <http://gunungsitolikota.bps.go.id>

B. Analisa Data

1. Deskripsi Data Penelitian

a. Deskripsi Variabel Pemberdayaan Masyarakat

Variabel pemberdayaan masyarakat pada penelitian ini diukur melalui 10 item pernyataan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Hasil tanggapan terhadap pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Tanggapan Responden terhadap Variabel Pemberdayaan Masyarakat

No	Skor					Jumlah
	SS	S	N	TS	STS	
1	103	80	66	0	0	249
	41,37	32,13	26,51	0,00	0,00	100
2	120	72	57	0	0	249
	48,19	28,92	22,89	0,00	0,00	100
3	94	83	72	0	0	249
	37,75	33,33	28,92	0,00	0,00	100
4	70	122	57	0	0	249
	28,11	49,00	22,89	0,00	0,00	100
5	67	125	57	0	0	249
	26,91	50,20	22,89	0,00	0,00	100
6	70	122	57	0	0	249
	28,11	49,00	22,89	0,00	0,00	100
7	69	121	57	2	0	249
	27,71	48,59	22,89	0,80	0,00	100
8	70	121	57	1	0	249
	28,11	48,59	22,89	0,40	0,00	100
9	77	105	66	1	0	249
	30,92	42,17	26,51	0,40	0,00	100
10	54	128	66	1	0	249
	21,69	51,41	26,51	0,40	0,00	100
Jlh	794,00	1079,00	612,00	5,00	0,00	2490,00
%	31,89	43,33	24,58	0,20	0,00	100

Pada pertanyaan pertama ditunjukkan oleh responden bahwa masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan program PNMP Mandiri. Hasil ini ditunjukkan oleh 41,37% jawaban sangat setuju dan 32,13% jawaban setuju. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan Alo'oa secara sadar melibatkan dan terlibat dalam kegiatan PNPM mandiri di wilayahnya dari awal perencanaan program kegiatan.

Pertanyaan kedua menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat teridentifikasi dengan keterlibatan secara fisik dalam kegiatan PNPM. Hasil ini ditunjukkan oleh 48,19% jawaban sangat setuju, 28,92% jawaban setuju dan 22,99% jawaban netral. Data ini menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan program PNPM Mandiri di desanya dengan turut bekerja secara fisik.

Pada pernyataan ketiga menunjukkan bahwa masyarakat turut berkontribusi dalam bentuk pendanaan dalam kegiatan PNPM Mandiri. Hasil ini ditunjukkan oleh 37,75% jawaban sangat setuju, 33,33% jawaban setuju dan 28,92% jawaban netral. Data ini menunjukkan sebagian besar masyarakat turut menyumbangkan material pada program PNPM Mandiri di desanya dalam bentuk finansial.

Pernyataan keempat menunjukkan bahwa masyarakat dapat diorganisir untuk terlibat secara produktif. Hasil ini ditunjukkan oleh 28,11% jawaban sangat setuju, 49,00% jawaban setuju dan 22,89% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait pada program PNPM Mandiri.

Pernyataan kelima menunjukkan bahwa struktur organisasi program disusun berdasarkan masukan dari masyarakat. Hasil ini ditunjukkan oleh 26,91% jawaban sangat setuju, 50,20% jawaban setuju dan 22,89% jawaban netral. Sistem dan struktur organisasi PNPM Mandiri diyakini masyarakat sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat dan tidak semata sebagai pelengkap administrasi saja.

Pernyataan keenam menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran terhadap kewajiban dalam pengembangan PNPM Mandiri. Hasil ini ditunjukkan oleh 28,11% jawaban sangat setuju, 49,00% jawaban setuju dan 22,89% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari kewajiban yang harus mereka laksanakan dalam mendukung program PNPM Mandiri di desanya.

Pernyataan ketujuh menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran terhadap hak dalam pengembangan PNPM Mandiri. Hasil ini ditunjukkan oleh 27,71% jawaban sangat setuju, 48,59% jawaban setuju, 22,89% jawaban netral dan 0,80% jawaban tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa selain melaksanakan kewajiban, masyarakat juga menyadari apa yang menjadi haknya dalam program PNPM Mandiri.

Pernyataan kedelapan menunjukkan bahwa masyarakat menjamin keberlangsungan proses kegiatan PNMP di daerahnya. Hasil ini ditunjukkan oleh 28,11% jawaban sangat setuju, 48,59% jawaban setuju, 22,89% jawaban netral dan 0,40% jawaban tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan suatu program dapat mengandalkan masyarakat sebagai elemen utama penggerak program-program pemberdayaan masyarakat.

Pernyataan kesembilan menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh keuntungan secara finansial dan fisik dari pengembangan program PNPM Mandiri. Hasil ini ditunjukkan oleh 30,92% jawaban sangat setuju, 42,17% jawaban setuju, 26,51% jawaban netral dan 0,40% jawaban tidak setuju. Data ini menunjukkan program PNPM Mandiri di desanya memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan masyarakat berupa keuntungan secara finansial dan juga berupa pembangunan fisik (sarana dan infrastruktur).

Pernyataan kesepuluh menunjukkan bahwa Masyarakat bersikap proaktif dalam pengembangan program PNMP Mandiri. Hasil ini ditunjukkan oleh 21,69% jawaban sangat setuju, 51,41% jawaban setuju, 26,51% jawaban netral dan 0,40% jawaban tidak setuju. Data ini menunjukkan dukungan nyata dari masyarakat dalam melaksanakan program PNPM Mandiri di desanya yang pada bertujuan untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Tanggapan responden sebagaimana pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju terhadap pernyataan variabel tentang pemberdayaan masyarakat dengan total persentase jawaban sangat setuju sebesar 31,89%, jawaban setuju sebesar 43,33%, jawaban netral sebesar 24,58% dan jawaban tidak setuju sebesar 0,20%.

b. Deskripsi Variabel Pelibatan Lintas Sektoral

Variabel pelibatan lintas sektoral pada penelitian ini diukur melalui 20 item pernyataan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Hasil tanggapan terhadap pelibatan lintas sektoral dapat dijelaskan pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Tanggapan Responden terhadap Variabel Pelibatan Lintas Sektoral

No	Skor					Jumlah
	SS	S	N	TS	STS	
1	54	129	66	0	0	249
	21,69	51,81	26,51	0,00	0,00	100
2	69	117	63	0	0	249
	27,71	46,99	25,30	0,00	0,00	100
3	81	108	60	0	0	249
	32,53	43,37	24,10	0,00	0,00	100
4	75	117	57	0	0	249
	30,12	46,99	22,89	0,00	0,00	100
5	54	129	66	0	0	249
	21,69	51,81	26,51	0,00	0,00	100
6	96	81	72	0	0	249
	38,55	32,53	28,92	0,00	0,00	100
7	65	103	81	0	0	249
	26,10	41,37	32,53	0,00	0,00	100
8	76	107	66	0	0	249
	30,52	42,97	26,51	0,00	0,00	100
9	78	108	63	0	0	249
	31,33	43,37	25,30	0,00	0,00	100
10	53	130	66	0	0	249
	21,29	52,21	26,51	0,00	0,00	100
11	70	119	60	0	0	249
	28,11	47,79	24,10	0,00	0,00	100
12	80	109	60	0	0	249
	32,13	43,78	24,10	0,00	0,00	100
13	70	122	57	0	0	249
	28,11	49,00	22,89	0,00	0,00	100

14	49	128	72	0	0	249
	19,68	51,41	28,92	0,00	0,00	100
15	91	83	75	0	0	249
	36,55	33,33	30,12	0,00	0,00	100
16	64	101	84	0	0	249
	25,70	40,56	33,73	0,00	0,00	100
17	81	102	66	0	0	249
	32,53	40,96	26,51	0,00	0,00	100
18	66	117	66	0	0	249
	26,51	46,99	26,51	0,00	0,00	100
19	87	103	59	0	0	249
	34,94	41,37	23,69	0,00	0,00	100
20	81	103	65	0	0	249
	32,53	41,37	26,10	0,00	0,00	100
Jlh	1440,00	2216,00	1324,00	0,00	0,00	4980,00
%	28,92	44,50	26,59	0,00	0,00	100

Pernyataan pertama menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Lapangan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mensosialisasikan tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, tahapan kegiatan, organisasi, proses, dan prosedur PNPM Mandiri Pedesaan. Hasil ini ditunjukkan oleh 21,69% jawaban sangat setuju, 51,81% jawaban setuju dan 26,51% jawaban netral dari seluruh responden. Data ini menunjukkan tahapan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang telah terlaksana di tingkat desa.

Pernyataan kedua menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan. Hasil ini

ditunjukkan oleh 27,71% jawaban sangat setuju, 46,99% jawaban setuju dan 25,30% jawaban netral.

KPMD/K yang telah terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi, akan memandu serangkaian tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang diawali dengan proses penggalian gagasan di tingkat dusun dan kelompok masyarakat. Data ini menunjukkan bahwa pelatihan kader pemberdayaan masyarakat tingkat desa telah dilaksanakan dengan mengacu pada indikator:

- 1) Masyarakat memahami informasi utama dari program PNPM Mandiri Perdesaan yang mencakup tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur, PNPM,
- 2) Masyarakat memahami dengan jelas peran dan tugas KPMD/K,
- 3) Adanya peningkatan kapasitas dalam melaksanakan teknik-teknik fasilitasi pertemuan secara partisipatif di tingkat masyarakat sebagai bagian dari tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,
- 4) Adanya peningkatan kapasitas dalam melaksanakan pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan menjalankan program PNPM Mandiri Perdesaan secara mandiri,
- 5) Adanya peningkatan kapasitas pada bidang administrasi dan pelaporan,
- 6) Adanya peningkatan kapasitas KPMD/K dalam menyusun rencana kerja,
- 7) Masyarakat memahami proses fasilitasi MMDD, ,
- 8) Masyarakat memahami alat pemetaan RTM secara partisipatif,
- 9) Masyarakat memahami materi diagram Venn kelembagaan masyarakat,

- 10) Masyarakat memahami pola dan tata cara penyampaian informasi,
- 11) Masyarakat memahami pola penanganan pengaduan dan masalah,
- 12) Masyarakat memahami tata cara monitoring dan evaluasi program.

Pernyataan ketiga menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Penggalan Gagasan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP). Hasil ini ditunjukkan oleh 32,53% jawaban sangat setuju, 43,37% jawaban setuju dan 24,10% jawaban netral. Data ini menunjukkan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP) dihadiri oleh kaum perempuan. Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP) bertujuan dalam rangka membahas gagasan dari kelompok-kelompok perempuan. Hasil pembahasan tersebut ditindaklanjuti dengan dan menetapkannya sebagai usulan kegiatan berdasarkan kebutuhan desa..

Pernyataan keempat menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Musdes Perencanaan Penulisan Usulan Desa. Hasil ini ditunjukkan oleh 30,12% jawaban sangat setuju, 46,99% jawaban setuju dan 22,89% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya kegiatan musyawarah perencanaan penulisan usulan desa yang diuraikan secara tertulis setiap gagasan-gagasan pada Musyawarah Antar Desa.

Pernyataan kelima menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Verifikasi Usulan MAD Prioritas. Hasil ini ditunjukkan oleh 21,69% jawaban sangat setuju, 51,81% jawaban setuju dan 26,51% jawaban netral. Data ini menunjukkan

bahwa telah terlaksananya verifikasi usulan MAD prioritas. MAD prioritas dilaksanakan untuk memeriksa dan menilai layak tidaknya setiap usulan aktivitas dari setiap desa untuk memperoleh pendanaan dari PNPM Mandiri Perdesaan.

Pernyataan keenam menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Usulan Musyawarah Antar Desa (MAD). Hasil ini ditunjukkan oleh 38,55% jawaban sangat setuju, 32,53% jawaban setuju dan 28,92% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya kegiatan usulan MAD yang memiliki tujuan membahas serta menyusun skala prioritas kegiatan.

Pernyataan ketujuh menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Penetapan Usulan Musdes. Hasil ini ditunjukkan oleh 26,10% jawaban sangat setuju, 41,37% jawaban setuju dan 32,53% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya penetapan usulan musdes yang bertujuan untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan..

Pernyataan kedelapan menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan menginformasi hasil MAD. Hasil ini ditunjukkan oleh 30,52% jawaban sangat setuju, 42,97% jawaban setuju dan 26,51% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diputuskan dalam MAD penetapan usulan. Musdes ini dilaksanakan baik di desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak.

Pernyataan kesembilan menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan pengesahan dokumen SPPB. Hasil ini ditunjukkan oleh 31,33% jawaban sangat setuju, 43,37% jawaban setuju dan 25,30% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya pengesahan dokumen SPPB dimana Ketua TPK, PjOK dan Ketua UPK akan membuat SPPB, yang diketahui Kades dan Camat atas nama Bupati/Walikota. Pengesahan SPPB dilakukan langsung segera sesudah diterbitkan SPC, dan tidak perlu menunggu persetujuan dari kabupaten/Kota.

Pernyataan kesepuluh menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan persiapan pelaksanaan. Hasil ini ditunjukkan oleh 21,29% jawaban sangat setuju, 52,21% jawaban setuju dan 26,51% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya persiapan pelaksanaan yang ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP-UPK, TPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan SPPB oleh Camat, sampai dengan masa persiapan pelaksanaan.

Pernyataan sebelas menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah terlibat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri. Hasil ini ditunjukkan oleh 28,11% jawaban sangat setuju, 47,79% jawaban setuju dan 24,10% jawaban netral. Data ini menunjukkan

bahwa telah teribatnya semua unsur dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri yang mencakup penyaluran dana, penyediaan tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat.

Pernyataan kedua belas menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan musdes pertanggungjawaban. Hasil ini ditunjukkan oleh 32,13% jawaban sangat setuju, 43,78% jawaban setuju dan 24,10% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya Musdes pertanggungjawaban yang bertujuan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat. Musyawarah pertanggungjawaban ini dilakukan secara bertahap minimal dua kali yaitu setelah memanfaatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan tahap pertama dan tahap kedua.

Pernyataan ketiga belas menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan pertanggungjawaban. Hasil ini ditunjukkan oleh 28,11% jawaban sangat setuju, 49,00% jawaban setuju dan 22,89% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa telah diterimanya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat.

Pernyataan keempat belas menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan melaksanakan Sertifikasi. Hasil ini ditunjukkan oleh 19,68% jawaban sangat setuju, 51,41% jawaban setuju dan 28,92% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya sertifikasi yang merupakan penerimaan hasil pekerjaan dan kegiatan berdasarkan spesifikasi teknis oleh Fasilitator Kecamatan. Tujuan sertifikasi adalah untuk

mendorong peningkatan kualitas pekerjaan. Jenis kegiatan sertifikasi meliputi sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan pelaksanaan pekerjaan. Sertifikasi dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan pada saat melakukan kunjungan lapangan. Hasil sertifikasi disampaikan di papan informasi agar dapat diketahui seluruh masyarakat.

Pernyataan kelima belas menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan melaksanakan revisi kegiatan. Hasil ini ditunjukkan oleh 36,55% jawaban sangat setuju, 33,33% jawaban setuju dan 30,12% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya revisi kegiatan oleh sebab perubahan situasi di lapangan selama tidak menambah besarnya dana bantuan dan tidak mengganti jenis kegiatan. Revisi tersebut dibuat oleh TPK dan disetujui oleh Fasilitator Kecamatan dan PjOK. Rencana revisi ini telah dimusyawarahkan TPK, Fasilitator Kecamatan dengan masyarakat. Pendataan perubahan tersebut harus segera dituangkan dalam Berita Acara Revisi lengkap dengan gambar perubahan dan jenis pengeluaran biaya. Kegiatan baru tidak boleh dilaksanakan sebelum proses revisi disetujui. **Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran.** Adanya perubahan boleh dilakukan beberapa kali di tiap lokasi.

Pernyataan keenam belas menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan melaksanakan dokumentasi kegiatan. Hasil ini ditunjukkan oleh 25,70% jawaban sangat setuju, 40,56% jawaban setuju dan 33,73% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya dokumentasi seluruh kegiatan dari PNPM Mandiri

oleh Fasilitator Kecamatan. Untuk kepentingan desa dan kecamatan, maka TPK dan UPK juga harus mengelola dokumentasi kegiatan.

Pernyataan ketujuh belas menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan oleh pemerintah. Hasil ini ditunjukkan oleh 32,53% jawaban sangat setuju, 40,96% jawaban setuju dan 26,51% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya pemantauan dan pemeriksaan oleh pemerintah

Pernyataan kedelapan belas menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan berjenjang. Hasil ini ditunjukkan oleh 26,51% jawaban sangat setuju, 46,99% jawaban setuju dan 26,51% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya pemantauan dan pemeriksaan berjenjang.

Pernyataan kesembilan belas menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan pemantauan oleh pihak lain. Hasil ini ditunjukkan oleh 34,94% jawaban sangat setuju, 41,37% jawaban setuju dan 23,69% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya pemantauan oleh pihak lain.

Pernyataan kedua puluh menunjukkan bahwa unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan audit dan pemeriksaan keuangan. Hasil ini ditunjukkan oleh

32,53% jawaban sangat setuju, 41,37% jawaban setuju dan 26,10% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa telah terlaksananya Audit dan Pemeriksaan Keuangan.

Tanggapan responden sebagaimana pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju terhadap pernyataan variabel tentang pemberdayaan masyarakat dengan total persentase jawaban sangat setuju sebesar 28,92%, jawaban setuju sebesar 44,50%, dan jawaban netral sebesar 26,59%.

c. Deskripsi Variabel Kesejahteraan Masyarakat

Variabel kesejahteraan masyarakat pada penelitian ini diukur melalui 10 item pernyataan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Hasil tanggapan terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Tanggapan Responden terhadap Variabel Kesejahteraan Masyarakat

No	Skor					Jumlah
	SS	S	N	TS	STS	
1	69	120	60	0	0	249
	27,71	48,19	24,10	0,00	0,00	100
2	76	121	52	0	0	249
	30,52	48,59	20,88	0,00	0,00	100
3	82	114	53	0	0	249
	32,93	45,78	21,29	0,00	0,00	100
4	71	112	58	8	0	249
	28,51	44,98	23,29	3,21	0,00	100
5	105	80	64	0	0	249
	42,17	32,13	25,70	0,00	0,00	100
6	75	102	72	0	0	249
	30,12	40,96	28,92	0,00	0,00	100
7	82	109	58	0	0	249
	32,93	43,78	23,29	0,00	0,00	100

8	82	109	58	0	0	249
	32,93	43,78	23,29	0,00	0,00	100
9	98	95	56	0	0	249
	39,36	38,15	22,49	0,00	0,00	100
10	82	104	63	0	0	249
	32,93	41,77	25,30	0,00	0,00	100
Jlh	822,00	1066,00	594,00	8,00	0,00	2490,00
%	33,01	42,81	23,86	0,32	0,00	100

Pada pertanyaan pertama ditunjukkan oleh responden bahwa seluruh anggota keluarga responden makan minimal tiga kali sehari. Hasil ini ditunjukkan oleh 27,71% jawaban sangat setuju, 48,19% jawaban setuju dan 24,10% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa mampu secara pangan dan memenuhi kebutuhan makan minum sebanyak tiga kali dalam sehari.

Pertanyaan kedua menunjukkan bahwa seluruh anggota keluarga responden memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian. Hasil ini ditunjukkan oleh 30,52 % jawaban sangat setuju 48,59 % jawaban setuju dan 20,88% jawaban netral. Data ini menunjukkan kemampuan masyarakat Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa memenuhi kebutuhan sandang dengan memiliki beberapa pakaian untuk kegiatan dan fungsi yang berbeda.

Pada pernyataan ketiga menunjukkan bahwa lantai rumah responden terbuat dari ubin. Hasil ini ditunjukkan oleh 32,93% jawaban sangat setuju, 45,78% jawaban setuju dan 21,29% jawaban netral. Data ini menunjukkan kemampuan masyarakat kecamatan Gunungsitoli Alo'oa memenuhi kebutuhan papan.

Pernyataan keempat menunjukkan bahwa apabila anggota keluarga responden yang sakit maka dibawa ke sarana/ petugas kesehatan. Hasil ini ditunjukkan oleh 28,51% jawaban sangat setuju, 44,98% jawaban setuju dan 23,29% jawaban netral, dan 3,21% jawaban tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum memiliki tingkat pemahaman yang jelas tentang kesehatan dan pemanfaatan sarana kesehatan. Namun beberapa keluarga masih mengandalkan pengobatan tradisional sebagai pilihan utama apabila anggota keluarga mengalami sakit atau penyakit.

Pernyataan kelima menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya sekali seminggu keluarga responden menyediakan daging atau ikan atau telur sebagai lauk pauk. Hasil ini ditunjukkan oleh 42,17% jawaban sangat setuju, 32,13% jawaban setuju dan 25,70% jawaban netral. Pemenuhan protein dan nutrisi untuk menunjang kesehatan anggota keluarga menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan keenam menunjukkan bahwa setidaknya satu orang anggota keluarga responden yang berumur 17 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap. Hasil ini ditunjukkan oleh 30,12% jawaban sangat setuju, 40,96% jawaban setuju dan 28,92% jawaban netral. Anggota keluarga yang memiliki pekerjaan dan berpenghasilan tetap menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan mendasar (sandang, pangan dan papan) yang merupakan salah satu indikator masyarakat sejahtera.

Pernyataan ketujuh menunjukkan bahwa seluruh anak di keluarga responden yang berusia 6-15 tahun bersekolah. Hasil ini ditunjukkan oleh 32,93% jawaban sangat setuju, 43,78% jawaban setuju, dan 23,29% jawaban netral. Tingkat kesadaran masyarakat akan

pentingnya pendidikan mendorong pertumbuhan kualitas hidup dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pernyataan kedepalan menunjukkan bahwa sebagian dari penghasilan keluarga responden dapat disisihkan untuk tabungan keluarga. Hasil ini ditunjukkan oleh 32,93% jawaban sangat setuju, 43,78% jawaban setuju, dan 23,29% jawaban netral. Data ini menunjukkan bahwa telah terpenuhinya kebutuhan mendasar (sandang, pangan dan papan) mendorong masyarakat mampu menabung untuk keperluan masa depan.

Pernyataan kesembilan menunjukkan bahwa responden memperoleh berita dengan membaca surat kabar, majalah, mendengarkan radio atau menonton televisi. Hasil ini ditunjukkan oleh 39,36% jawaban sangat setuju, 38,15% jawaban setuju, dan 22,49% jawaban netral. Data ini menunjukkan secara langsung meningkatnya taraf hidup masyarakat sehingga mendorong kepemilikan barang diluar dari kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Pernyataan sepuluh menunjukkan bahwa keluarga responden atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi. Hasil ini ditunjukkan oleh 32,93% jawaban sangat setuju, 41,77% jawaban setuju, dan 25,30% jawaban netral. Data ini menunjukkan tingkat kepedulian sosial masyarakat semakin tinggi, di sisi lain menunjukkan adanya dana cadangan (meskipun tidak dalam jumlah yang besar).

Tanggapan responden sebagaimana pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju terhadap pernyataan variabel

tentang kesejahteraan masyarakat dengan total persentase jawaban sangat setuju sebesar 33,01%, jawaban setuju sebesar 42,81%, jawaban netral sebesar 23,86% dan jawaban tidak setuju sebesar 0,32%.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang signifikan yang mendekati sempurna antar variabel independen. Jika antar sesama variabel independen terdapat korelasi yang signifikan, maka pada model regresi linear tersebut terdapat gejala multikolinieritas. Tabel 4.11 menyajikan hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Multikolinieritas
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,581	1,589		3,512	,001		
	Pemberdayaan_Masyarakat	,156	,042	,152	3,740	,000	,656	1,524
	Pelibatan_Lintas_Sektoral	,432	,023	,757	18,568	,000	,656	1,524

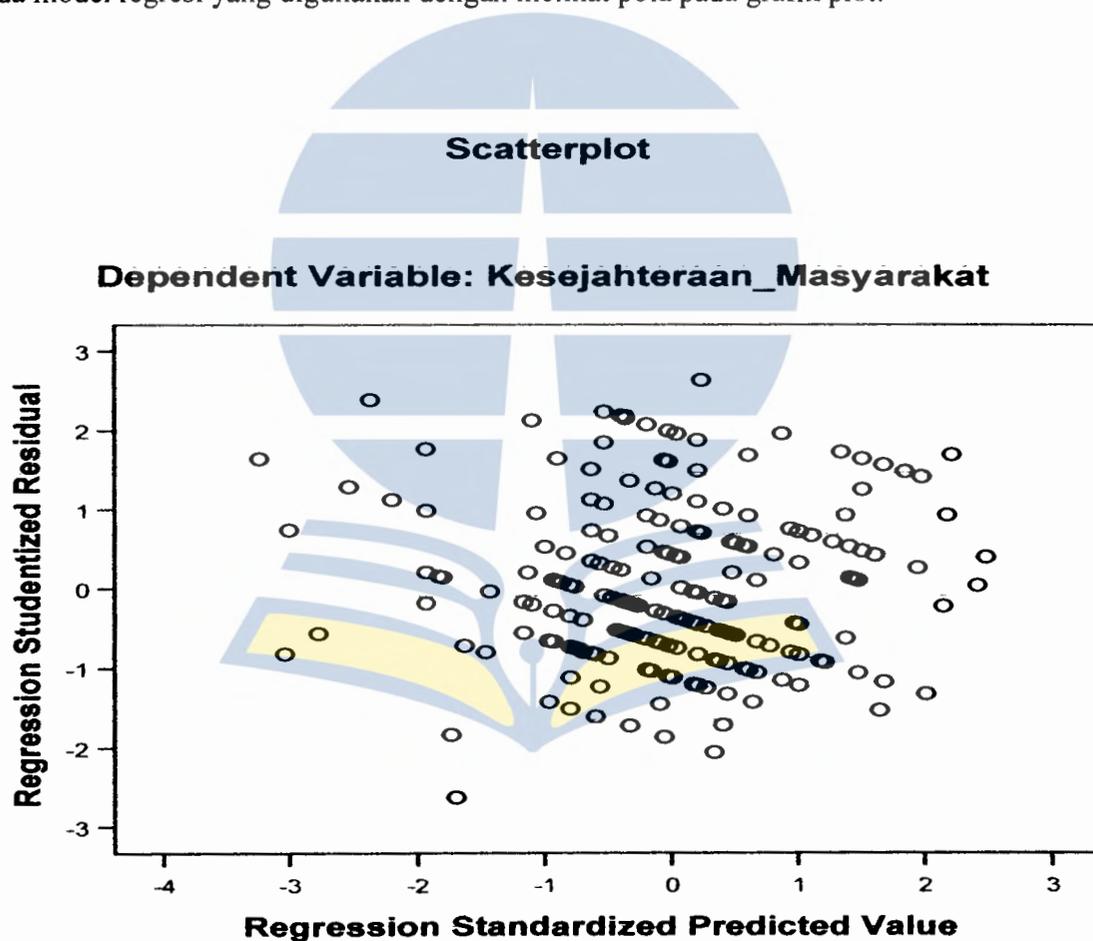
a. Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas, hasil perhitungan nilai *tolerance* terlihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* <0,10 yang artinya tidak ada korelasi antara variabel independen yang lebih dari 95%. Demikian juga dengan hasil perhitungan nilai VIF, dari kedua variabel independen yang diuji memiliki nilai

VIF yang lebih <5 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independent dalam model regresi.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya heterokedastisitas pada model regresi yang digunakan dengan melihat pola pada grafik plot.



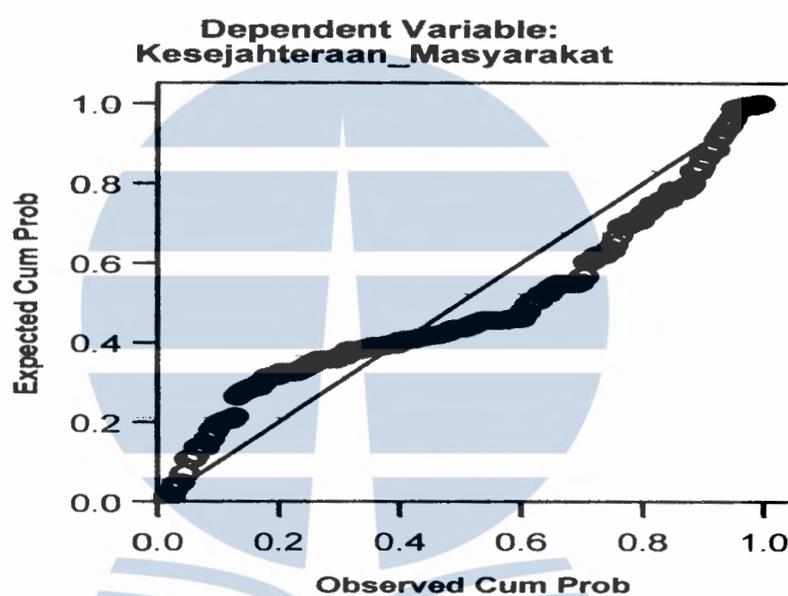
Gambar 4.1
Grafik Scatterplot

Hasil grafik *Scatterplot* pada gambar 4.1 terlihat titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Grafik tersebut juga menunjukkan titik-titik tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, hasil tersebut menunjukkan tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas pada model regresi yang dibuat, sehingga model regresi layak dipakai sebagai alat prediksi.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian distribusi normal dilakukan dengan cara melihat histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Disamping itu digunakan normal probability plot yang bertujuan membandingkan distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data distribusi normal. Jika distribusi normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Berdasarkan tampilan grafik histogram dan grafik normal plot yang tersaji dalam lembar lampiran pengujian asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonalnya. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2
P-P Plot Regresi Standar Residual

Dari hasil pengujian diperoleh data membentuk garis lurus yang dapat disimpulkan bahwa linearitas dalam regresi terpenuhi.

C. Analisa Persamaan Regresi Linear Berganda

Apabila data telah memenuhi uji asumsi klasik dimana data tidak terdapat gejala multikolinieritas dan data tidak heterokedastisitas serta terdistribusi dengan normal, maka data tersebut memiliki model persamaan regresi yang baik. Analisis regresi digunakan untuk menguji

hipotesis tentang pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi berganda dengan program SPSS diperoleh hasil seperti Tabel 4.12.

Tabel 4. 12
Persamaan Regresi
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,581	1,589		3,512	,001
	Pemberdayaan_Masyarakat	,156	,042	,152	3,740	,000
	Pelibatan_Lintas_Sektoral	,432	,023	,757	18,568	,000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 0,152 X_1 + 0,757 X_2$$

Keterangan:

Y = Kesejahteraan Masyarakat

X₁ = Pemberdayaan Masyarakat

X₂ = Pelibatan Lintas Sektoral

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Variabel pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan lintas sektoral mempunyai arah koefisien yang bertanda positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Koefisien pemberdayaan masyarakat memberikan nilai sebesar 0,152 yang berarti bahwa jika kesejahteraan masyarakat semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami peningkatan.

3. Koefisien pelibatan lintas sektoral memberikan nilai sebesar 0,757 yang berarti bahwa jika pelibatan lintas sektoral semakin tinggi dengan asumsi variabel lain tetap maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami peningkatan.

D. Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikolinieritas, heterokedastisitas dan normalitas. Pengujian hipotesis merupakan pembuktian statistik atas semua yang telah dihipotesiskan dalam penelitian bersarkan teori. Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan digunakan metode uji secara serempak (uji F), uji koefisien determinasi (R^2), dan uji secaraparsial (uji t)

1. Uji Secara Serempak (Uji F)

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama diuji dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan regresi secara simultan diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Analisis Regresi Secara Simultan
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3293,393	2	1646,697	335,383	,000(a)
	Residual	1207,836	246	4,910		
	Total	4501,229	248			

a Predictors: (Constant), Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat

b Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Pengujian pengaruh variabel bebas secara serempak terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil pengolahan data dan perhitungan statistik menunjukkan nilai

F hitung = 335,383. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan variabel pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan lintas sektoral mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variable independennya. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *adjusted R square* sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.14:

Tabel 4.14
Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.855(a)	.732	.729	2,21583

a Predictors: (Constant), Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R²*) yang diperoleh sebesar 0,729. Hal ini berarti 72,9 % variasi variabel kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel pemberdayaan masyarakat dan pelibatan lintas sektoral, sedangkan sisanya sebesar 26,1 % diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

3. Uji Secara Parsial (Uji t)

Dalam penelitian ini, Hipotesis 1 dan 2 diuji kebenarannya dengan menggunakan uji parsial. Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikansi (pvalue), jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan di bawah 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf signifikansi hasil hitung lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

Tabel 4.15
Hasil Uji t Secara Parsial
Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,581	1,589		3,512	,001
Pemberdayaan_Masyarakat	,156	,042	,152	3,740	,000
Pelibatan_Lintas_Sektoral	,432	,023	,757	18,568	,000

a Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

a. Uji Hipotesis 1

Perumusan hipotesis:

H₁ : Pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan dalam pengembangan manajemen PNPM Mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dengan ketentuan apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho₁ diterima dan Ha₂ ditolak, sedangkan apabila probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho₁ ditolak dan Ha₂ diterima.

Dari Tabel 4.15 terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis pemberdayaan masyarakat menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,740 dengan taraf signifikansi 0,000. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H_{a1} “Terdapat pengaruh signifikan positif antara pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan manajemen PNPM Mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat” diterima.

b. Uji Hipotesis 2

H_2 : Pelibatan lintas sektoral berpengaruh positif dan signifikan dalam pengembangan manajemen PNPM Mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dengan ketentuan apabila probabilitas signifikansi > 0.05 , maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak, sedangkan apabila probabilitas signifikansi < 0.05 , maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima.

Dari Tabel 4.15 terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis pelibatan lintas sektoral menunjukkan nilai t hitung sebesar 18,568 dengan taraf signifikansi 0,000. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H_{a1} “Terdapat pengaruh signifikan positif antara pelibatan lintas sektoral dalam pengembangan manajemen PNPM Mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat” diterima.

c. Uji Hipotesis 3

H₃ : Pemberdayaan masyarakat dan pelibatan lintas sektoral berpengaruh positif dan signifikan dalam pengembangan manajemen PNPM Mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 335,383. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan variabel pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan lintas sektoral mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji parsial pengujian secara statistik dapat terlihat dengan jelas bahwa secara parsial (individu) kedua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Pengaruh yang diberikan kedua variabel bebas tersebut bersifat positif dimana semakin tinggi pemberdayaan masyarakat dan pelibatan lintas sektoral maka mengakibatkan semakin tinggi kesejahteraan masyarakat. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya. Penjelasan dari masing-masing pengaruh variabel dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Manajemen PNPM Mandiri Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Data pada pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang pertama yang mempresentasikan pengaruh positif dan signifikan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat terbukti. Hal ini berarti masyarakat sebagai elemen penggerak dalam suatu organisasi yang ditinjau dari dimensi kontribusi masyarakat, dimensi pengorganisasian masyarakat, dimensi pemberdayaan masyarakat, dan dimensi keterlibatan dalam tahap sosialisasi efektif serta signifikan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat berpusat pada masyarakat, adanya keterlibatan masyarakat, adanya penguatan masyarakat dan prinsip keberlanjutan. Keterlibatan masyarakat miskin, kelompok perempuan, kelompok rentan, dan kelompok terpinggirkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kegiatan/proyek cenderung semakin meningkat. Keberadaan kelompok masyarakat (pokmas) yang dipercaya oleh masyarakat dan akuntabel semakin meningkat yang ditunjukkan dari peningkatan kesertaan masyarakat dalam kelompok masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih) serta

peningkatan kemampuan masyarakat dalam akses informasi (terutama permodalan dan pasar). Adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang, terutama kebutuhan pangan.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur dasar serta peningkatan produktifitas usaha baru dari masyarakat yang dapat dikembangkan melalui program PNPM Mandiri.

Dari aspek kesehatan dan sanitasi terlihat peningkatan kualitas ibu hamil, menyusui, dan anak, penurunan kematian ibu hamil, bayi, dan balita serta peningkatan suplai air bersih dan penggunaan air bersih oleh masyarakat.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Prawoto (2012) yang menyatakan adanya pengaruh positif pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kemandirian untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Syukri, Mawardi dan Akhmadi (Lembaga Penelitian SEMERU, 2013) yang menyatakan PNPM memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kemiskinan di wilayah sampel.

Pelibatan masyarakat secara langsung dalam program pemberdayaan akan berdampak langsung kepada masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Hal yang langsung dapat diperoleh oleh masyarakat adanya peningkatan ekonomi dengan memperoleh : (1) pendapatan secara langsung berupa gaji atau upah (2) ketrampilan atau skill yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (3) perubahan pola pikir melalui pelatihan capacity building (4) memperoleh manfaat secara langsung atau tidak langsung dari pembangunan fisik, baik berupa pembangunan jalan maupun

pembangunan sarana prasarana lain di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan (5) bantuan modal usaha khususnya bagi perempuan melalui salah satu program dari PNPM mandiri yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Hal ini sesuai penelitian terdahulu oleh Fan dkk (2000) yang menyatakan bahwa pada peningkatan infrastruktur di pedesaan memiliki kontribusi yang baik terhadap penurunan penduduk miskin di pedesaan namun kontribusi yang lebih besar diberikan dari sektor pertanian dan Rezeki (2006) yang menyatakan adanya pengaruh positif pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui simpan pinjam untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang atas kekuatan sendiri. Walaupun demikian, karena berbagai sebab potensi tersebut masih sering bersifat laten, sehingga pengaruhnya bagi kondisi kehidupan masyarakat belum signifikan, oleh sebab itu tidak jarang dijumpai suatu masyarakat yang mempunyai potensi dan sumber daya yang cukup besar akan tetapi kondisinya masih cukup rendah. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk mendorong tumbuh dan teraktualisasinya potensi tersebut melalui berbagai tindakan bersama masyarakat.

Oleh karena prinsipnya adalah aktualisasi potensi masyarakat, maka berbagai aktifitas yang dilakukan lebih mengutamakan semangat swadaya dan mengandalkan pengembangan kapasitas internal.

Memang disadari, untuk aktualisasi potensi tersebut bukannya tanpa hambatan, sikap ketergantungan dan kurang percaya pada kekuatan sendiri tidak jarang menjadi faktor penghambatnya. Apabila hambatan tersebut dapat diatasi, semangat melakukan perubahan

atas kemampuannya sendiri telah tumbuh dan hasilnya telah dapat dirasakan, maka secara kumulatif hasil yang dirasakan tersebut akan mendorong tindakan yang sama dan menghasilkan kesinambungan serta peningkatan aktifitas yang berbasis azas swadaya.

Salah satu bentuk dari aktualisasi pemberdayaan masyarakat tercermin dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses baik dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga menikmati hasil. Peningkatan partisipasi dan peran masyarakat pada keseluruhan tahapan proses akan berarti bahwa aktifitas peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak harus menunggu datangnya program dari pemerintah. Masyarakat sendiri yang membuat dan merencanakan program, tidak harus menjadi konsumen program. Dengan cara tersebut program-program yang dilaksanakan lebih relevan dengan kebutuhan dan masalah yang aktual, dan masyarakat merasa memiliki program tersebut, karena merasa ikut merumuskan.

2. Pengaruh Pelibatan Lintas Sektoral dalam Pengembangan Manajemen PNPM Mandiri Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Data pada pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang kedua yang mempresentasikan pengaruh positif dan signifikan pelibatan lintas sektoral terhadap kesejahteraan masyarakat terbukti. Hal ini menunjukkan pelibatan lintas sektoral khususnya pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengujian secara statistik membuktikan bahwa pelibatan lintas sektoral berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu berinisiatif dalam mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat di wilayahnya agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di wilayahnya. Perencanaan partisipatif yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan didukung penganggaran yang berpihak kepada masyarakat akan akan membangun sinergis antara masyarakat dan pemerintah. Partisipasi dan dukungan dari pemerintah daerah turut menjamin keberlanjutan program-program peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dari segi keuangan yang didasarkan pada Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan daerah, maka pemerintah daerah mempunyai sumber keuangan yang diperoleh lewat : (1) Pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah; (2) dana perimbangan (90 % dari bagian PBB, 80 % dari perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan sebagian hasil sumber daya alam yang meliputi 30 % hasil gas alam, 15 % dari minyak bumi, dan 80 % hasil dari utang, tambang lain dan perikanan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus); (3) pinjaman daerah dan (4) pendanaan lain yang sah.

Berdasarkan Undang-undang tersebut di atas memuat 5 (lima) tujuan utama : (1) mempererat kesatuan bangsa; (2) meningkatkan efisiensi administrasi; (3) mewujudkan kemandirian daerah; (4) memacu pembangunan sosial ekonomi dan (5) membentuk pemerintah yang demokratis yang mendorong munculnya inovasi dan partisipasi masyarakat (Sarundayang : 1999).

Mewujudkan kemandirian daerah yang berbasis kemandirian masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur seperti sarana kesehatan, sanitasi,

pendidikan, transportasi memaksimalkan dari keuangan daerah akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat itu sendiri.

Hal ini sesuai penelitian terdahulu oleh Fan dkk (2000) yang menyatakan bahwa pada peningkatan infrastruktur di pedesaan memiliki kontribusi yang baik terhadap penurunan penduduk miskin di pedesaan namun kontribusi yang lebih besar diberikan dari sektor pertanian dan Roberts (2003) menyatakan pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan dengan pemenuhan fasilitas dasar akan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin, berpengaruh positif terhadap tingkat kematian anak.

Pelibatan pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal penegakan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi pada setiap program pemberdayaan masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari aspek anggaran, adanya peningkatan komposisi anggaran daerah untuk program/kegiatan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan jumlah dan kualitas kebijakan daerah yang pro rakyat miskin.

Tata kelola pemerintah yang cenderung membaik meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah di sektor publik. Adanya peningkatan kemauan dan kemampuan para pelaku (terutama pemerintah daerah) dalam memberikan akses informasi (terutama permodalan dan pasar) serta peningkatan kesadaran dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Pemerintah sebagai pemberi stimulan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan dituntut mampu melakukan perubahan positif pada peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah harus berupaya memaksimalkan tahapan-tahapan dari setiap program yang dilaksanakan agar tepat sasaran dan berdayaguna serta selalu

mengevaluasi setiap tahapan karena dana yang dikucurkan oleh pemerintah harus berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat dapat terwujud. Pemerintah berkewajiban terlibat langsung dalam setiap proses yang dilaksanakan, tetapi bukan dalam bentuk intervensi yang mendikte masyarakat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

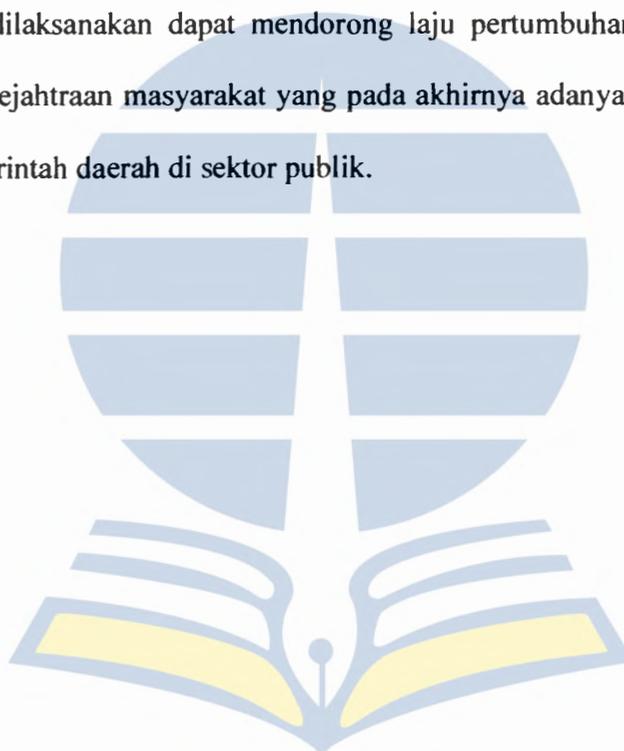
1. Pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan dalam manajemen pengembangan PNPM Mandiri terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.
2. Pelibatan lintas sektoral berpengaruh positif dan signifikan dalam manajemen pengembangan PNPM Mandiri terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelibatan lintas sektoral secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan dalam manajemen pengembangan PNPM Mandiri terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Masyarakat sebagai penggerak utama dalam meningkatkan taraf hidup hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia daripada pembangunan fisik.

2. Hendaknya Pemerintah Daerah meningkatkan komposisi anggaran daerah untuk program/kegiatan penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan jumlah dan kualitas kebijakan daerah yang pro rakyat miskin.
3. Hendaknya seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam lintas sektoral pengembangan PNPM Mandiri selalu mengevaluasi setiap tahapan pelaksanaan, agar program yang dilaksanakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya adanya peningkatan kinerja pelayanan pemerintah daerah di sektor publik.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1997). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Anas Sudjiono, (1999). *Pengantar Statistik Pendidikan*, PT. Grafindo Sejahtera: Jakarta.
- BPS Indonesia. (2008). *Analisis dan penghitungan tingkat kemiskinan tahun*. BPS: Jakarta.
- Chamber, Robert. (1995). *Poverty and livelihoods: whose reality counts?. Environment and Urbanization*.:Sagepublications.
- Cooper, D.R. & C.W.Emory. (1995). *Bussines Research Methods. 5th Edition, USA, Irwin*
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro: Semarang.
- Friedman, Jhon. (1992). *Empowerment. The Politics of Alternative Development*. Harper and Row : New York.
- <http://www.pnpm-mandiri.org>.
- Ife, Jim. (1996). *Community Developmet Creating Alternative Vision Analysis and Practice*. Addison Wesley longman Australia Pry Ltd: Melbourne.
- Lewis, Oscar. (1996). *The Culture of Poverty*. In G. Gmelch and W. Zenner, eds. *Urban Life*: Waveland Press.
- Nana Sudjana & Ibrahim, (1989), *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru.
- Nasution. (2001). *Metode Research*. Jakarta: BMNI Aksara.
- Panudju, Bambang. (1999). *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung, :Penerbit Alumni.
- Parsons, C. (1994). *Excluding Primary School Children*. London: Family Policy Studies Centre.
- PKPM JIKa – Bappenas Working Team. (2004-2006). *ABC Workshop for Training Facilitator, Summary Record on the Series of PKPM Training*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009.

Riduwan. (2004). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta: Bandung.

Sarundayang. (1999). *Arus balik kekuasaan pusat ke daerah*. Sinar Harapan : Jakarta

Sedarmayanti & Syarifudin. (2002). *Metodologi Penelitian*. Penerbit Mandar Maju. Bandung.

Subino. (1982). *Bimbingan Skripsi*. Aba Yapari: Bandung.

Situmorang, Syafrizal Helmi dan Lufti, Muslich. (2014). *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. USU Press: Medan.

Sudjana. (1996). *Metoda Statistika*. Penerbit Tarsito: Bandung.

Suharto, Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT.Refika Pratama: Bandung.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Penerbit Alfabeta: Bandung

Sugiyono. (2007) *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta: Bandung .

Sutomo.(2006). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Jaya: Yogyakarta.

Suryabrata, Sumadi. (2003). *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah

Y. Slamet. (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press: Surakarta.

Zalmant, Gerald. (1972). *Creating Social Change*. Holt Rinehart and Winston Inc: New York.

Jurnal

Mujiyadi, B. (2012) *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pinggiran Kota. Studi Pekerjaan Sosial tentang Petani Penggarap di Lahan Sementara (The Empowerment of Suburban Poor*

People: Social Work Study at the Subsistence Farmer). *Sosiokonsepia* Vol. 17, No. 02 2012.

Parsons, C. (1996). *Permanent Exclusions from Schools in England: Trends, Causes and Responses*, *Children and Society*, 10, 177–186.

Prawoto, Nano. (2012). Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng di Propinsi Jawa Tengah). *Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 8, Nomor 2, September 2012, 135-154.

Rappoport, J. (1984). *Studies in Empowerment: Introduction to the issue*. *Prevention in Human Services*, 3: 1-7.

Rafsanzani, H., Supriyono, B., dan Suwondo. (2010) Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, Hal. 67- 72.

Suandi, Jasminarni, Novita, T., Evita dan Suryono. (2011). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Pertanian Organik Berbasis Trikolimtan di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* No. Tahun 2011. ISSN: 1410-0770.

Swift, Carolyn. Levin, Gloria. (1987). *Empowerment: An emerging mental health technology* *Journal of Primary Prevention Fall/Winter 1987*, Volume 8, Issue 1-2, pp 71-94.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Angket

PENGARUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELIBATAN LINTAS SEKTORAL DALAM MANAJEMEN PENGEMBANGAN PNPM MANDIRI TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA

Bapak, Ibu dan Saudara terhormat,
Daftar Pernyataan (kuisisioner) ini dibuat sebagai bahan pengumpulan data yang akan dipergunakan untuk penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Manajemen UT oleh:

Nama : **YAMINUDIN HALAWA**
NIM : **500014281**

Tujuan pengambilan data angket ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat dan Pelibatan Lintas Sektoral dalam Manajemen Pengembangan PNPM Mandiri terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
Oleh karenanya, kami mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara berkenan dapat membantu mengisi dan menjawab angket ini dengan sebenar-benarnya.
Atas segala bantuan Bapak/Ibu/Sdr kami ucapkan terima kasih dan data yang kami peroleh akan kami jaga kerahasiaannya.

PETUNJUK UMUM

Pernyataan dalam angket ini merupakan substansi yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, pelibatan lintas sektoral dalam Manajemen Pengembangan PNPM Mandiri dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Dari pernyataan yang disampaikan, silahkan memilih jawaban yang sesuai dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang tersedia dan berikan alasan terhadap jawaban tersebut dan terdapat lima pilihan jawaban dari setiap pertanyaan yaitu (5) Sangat Setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Kurang Setuju dan, (5) Sangat Tidak Setuju.

IDENTITAS RESPONDEN

1	Nama	
2	Alamat	
3	Umur	
4	Jenis Kelamin	
5	Pendidikan Terakhir	
6	Jabatan	

PERMBERDAYAAN MASYARAKAT						
No	Pertanyaan	Pilihan				
		SS	S	N	KS	STS
1	Menurut saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan program PNMP Mandiri					
	Alasan					
2	Bentuk partisipasi masyarakat teridentifikasi dengan keterlibatan secara fisik dalam kegiatan PNPM Mandiri					
	Alasan					
3	Masyarakat turut berkontribusi dalam bentuk pendanaan dalam kegiatan PNPM Mandiri					
	Alasan					
4	Masyarakat dapat diorganisir untuk terlibat secara produktif					
	Alasan					
5	Struktur organisasi program disusun berdasarkan masukan dari masyarakat					
	Alasan					

6	Masyarakat memiliki kesadaran terhadap kewajiban dalam pengembangan PNPM Mandiri.					
	Alasan					
7	Masyarakat memiliki kesadaran terhadap hak dalam pengembangan PNPM Mandiri.					
	Alasan					
8	Masyarakat menjamin keberlangsungan proses kegiatan PNMP di daerahnya					
	Alasan					
9	Masyarakat memperoleh keuntungan secara finansial dan fisik dari pengembangan program PNPM Mandiri					
	Alasan					
10	Masyarakat bersikap proaktif dalam pengembangan program PNMP Mandiri					
	Alasan					

PELIBATAN LINTAS SEKTORAL						
No	Pertanyaan	Pilihan				
		SS	S	N	KS	STS
1	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mensosialisasikan tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur PNPM Mandiri Pedesaan					
	Alasan					
2	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK)					

	dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan					
	Alasan					
3	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah terlibat dalam Penggalan Gagasan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP)					
	Alasan					
4	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah terlibat dalam Musdes Perencanaan Penulisan Usulan Desa					
	Alasan					
5	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Verifikasi Usulan MAD Prioritas					
	Alasan					
6	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah terlibat dalam Usulan Musyawarah Antar Desa (MAD)					
	Alasan					
7	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah terlibat dalam Penetapan Usulan Musdes					
	Alasan					

8	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah terlibat dalam menginformasi Hasil MAD					
	Alasan					
9	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah terlibat dalam Pengesahan Dokumen SPPB					
	Alasan					
10	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Persiapan Pelaksanaan					
	Alasan					
11	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah terlibat dalam Pelaksanaan program PNPM Mandiri					
	Alasan					
12	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah terlibat dalam Musdes pertanggung jawaban					
	Alasan					
13	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Pertanggungjawaban					
	Alasan					

14	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Sertifikasi					
	Alasan					
15	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Revisi Kegiatan					
	Alasan					
16	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Dokumentasi Kegiatan					
	Alasan					
17	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah					
	Alasan					
18	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Pemantauan dan Pemeriksaan Berjenjang					
	Alasan					
19	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah terlibat dalam Pemantauan oleh Pihak Lain					

	Alasan					
20	Unsur-unsur perangkat kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan Audit dan Pemeriksaan Keuangan					
	Alasan					

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
No	Pertanyaan	Pilihan				
		SS	S	N	KS	STS
1	Seluruh anggota keluarga saya makan minimal tiga kali sehari.					
	Alasan					
2	Seluruh anggota keluarga saya memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah. dan bepergian.					
	Alasan					
3	Lantai rumah saya terbuat dari ubin					
	Alasan					
4	Apabila anggota keluarga saya yang sakit maka dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.					
	Alasan					
5	Sekurang-kurangnya sekali seminggu keluarga saya menyediakan daging atau ikan atau telur sebagai lauk pauk.					
	Alasan					
6	Setidaknya satu orang anggota keluarga saya yang berumur 17 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap.					

	Alasan					
7	Seluruh anak di keluarga saya yang berusia 6-15 tahun bersekolah.					
	Alasan					
8	Sebagian dari penghasilan keluarga saya dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.					
	Alasan					
9	Saya memperoleh berita dengan membaca surat kabar, majalah, mendengarkan radio atau menonton televisi.					
	Alasan					
10	Keluarga saya atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.					
	Alasan					

Lampiran 2 Validitas dan Reliabilitas Variabel Pemberdayaan Masyarakat

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	64	100,0
	Excluded(a)	0	,0
	Total	64	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,778	10

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
item1	3,6094	1,09279	64
item2	3,7813	1,07598	64
item3	3,7969	,99490	64
item4	4,0156	,78664	64
item5	3,6719	,97679	64
item6	4,0156	,78664	64
item7	4,0156	,78664	64
item8	4,0156	,78664	64
item9	3,5313	1,03845	64
item10	3,7188	,88135	64

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item1	34,5625	24,345	,303	,782
item2	34,3906	24,210	,325	,778
item3	34,3750	24,683	,318	,777
item4	34,1563	23,182	,662	,736

item5	34,5000	24,349	,364	,771
item6	34,1563	23,182	,662	,736
item7	34,1563	23,182	,662	,736
item8	34,1563	23,182	,662	,736
item9	34,6406	24,234	,342	,775
item10	34,4531	24,569	,397	,766

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
38,1719	28,811	5,36761	10



Lampiran 3 Validitas dan Reliabilitas Variabel Pelibatan Lintas Sektoral

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	64	100,0
	Excluded(a)	0	,0
	Total	64	100,0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,877	20

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
item11	3,7969	,73850	64
item12	3,6563	1,04226	64
item13	3,9531	,82481	64
item14	3,9844	,82601	64
item15	3,7969	,73850	64
item16	3,8125	,95743	64
item17	3,6406	,89739	64
item18	3,8438	,89476	64
item19	3,9219	,82240	64
item20	3,7969	,73850	64
item21	3,7813	1,03078	64
item22	3,9531	,82481	64
item23	3,9688	,95898	64
item24	3,7031	,74917	64
item25	3,9375	,85217	64
item26	3,6875	,88864	64
item27	3,8438	,92956	64
item28	3,8906	,81877	64
item29	3,7813	,95067	64

item30	3,8281	,88290	64
--------	--------	--------	----

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item11	72,7813	82,396	,644	,867
item12	72,9219	84,740	,300	,879
item13	72,6250	81,032	,665	,866
item14	72,5938	86,436	,291	,878
item15	72,7813	82,396	,644	,867
item16	72,7656	81,833	,510	,871
item17	72,9375	85,869	,295	,878
item18	72,7344	84,547	,379	,875
item19	72,6563	80,166	,729	,864
item20	72,7813	82,396	,644	,867
item21	72,7969	82,260	,442	,874
item22	72,6250	80,905	,674	,866
item23	72,6094	84,305	,361	,876
item24	72,8750	82,492	,627	,868
item25	72,6406	83,535	,470	,872
item26	72,8906	85,432	,326	,877
item27	72,7344	84,897	,340	,877
item28	72,6875	82,377	,574	,869
item29	72,7969	85,244	,310	,878
item30	72,7500	80,444	,654	,866

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
76,5781	91,581	9,56980	20

Lampiran 4 Validitas dan Reliabilitas Variabel Kesejahteraan Masyarakat

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	64	100,0
	Excluded(a)	0	,0
	Total	64	100,0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,757	10

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
item31	3,8750	1,11981	64
item32	4,0313	,79620	64
item33	3,8750	,98400	64
item34	3,6406	,80410	64
item35	3,8594	,90619	64
item36	3,6094	,91923	64
item37	3,8750	,86373	64
item38	3,8438	,83986	64
item39	3,7969	,92890	64
item40	3,8281	,88290	64

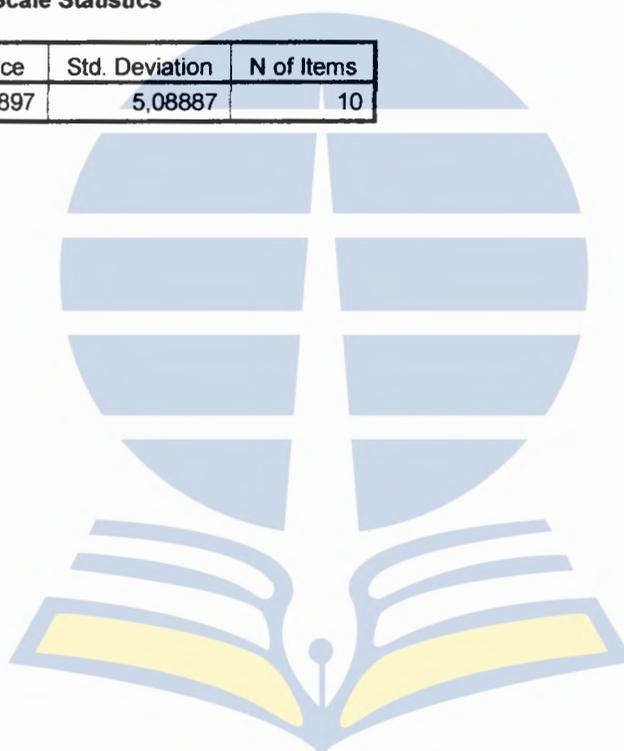
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item31	34,3594	21,472	,306	,758
item32	34,2031	22,482	,368	,743

item33	34,3594	22,012	,316	,752
item34	34,5938	21,261	,538	,722
item35	34,3750	22,048	,356	,745
item36	34,6250	21,794	,380	,742
item37	34,3594	21,281	,486	,728
item38	34,3906	20,813	,571	,717
item39	34,4375	21,425	,420	,736
item40	34,4063	20,848	,529	,721

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
38,2344	25,897	5,08887	10



Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinieritas

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,855(a)	,732	,729	2,21583

a Predictors: (Constant), Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3293,393	2	1646,697	335,383	,000(a)
	Residual	1207,836	246	4,910		
	Total	4501,229	248			

a Predictors: (Constant), Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat

b Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,581	1,589		3,512	,001		
	Pemberdayaan_Masyarakat	,156	,042	,152	3,740	,000	,656	1,524
	Pelibatan_Lintas_Sektoral	,432	,023	,757	18,568	,000	,656	1,524

a Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Coefficient Correlations(a)

Model			Pelibatan_Lintas_Sektoral	Pemberdayaan Masyarakat
1	Correlations	Pelibatan_Lintas_Sektoral	1,000	-,586
		Pemberdayaan_Masyarakat	-,586	1,000
	Covariances	Pelibatan_Lintas_Sektoral	,001	-,001
		Pemberdayaan_Masyarakat	-,001	,002

a Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Collinearity Diagnostics(a)

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Pemberdayaan Masyarakat	Pelibatan_Lintas_Sektoral
1	1	2,991	1,000	,00	,00	,00
	2	,005	23,814	,95	,37	,08
	3	,004	27,230	,05	,63	,92

a Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Regression

Notes

Output Created		06-APR-2015 19:26:19
Comments		
Input	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	249
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		<pre> REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Kesejahteraan_Masyarakat /METHOD=ENTER Pemberdayaan_Masyarakat Pelibatan_Lintas_Sektoral </pre>
Resources	Elapsed Time	0:00:00,01
	Memory Required	1628 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	0 bytes

[DataSet0]

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
-------	-------------------	-------------------	--------

1	Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat(a)		Enter
---	---	--	-------

- a All requested variables entered.
b Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,855(a)	,732	,729	2,21583

- a Predictors: (Constant), Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3293,393	2	1646,697	335,383	,000(a)
	Residual	1207,836	246	4,910		
	Total	4501,229	248			

- a Predictors: (Constant), Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat
b Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	Sig.
1	(Constant)	5,581	1,589		3,512	,001		
	Pemberdayaan_Masyarakat	,156	,042	,152	3,740	,000	,656	
	Pelibatan_Lintas_Sektoral	,432	,023	,757	18,568	,000	,656	

- a Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Coefficient Correlations(a)

Model		Pelibatan_Lintas_Sektoral	Pemberdayaan_Masyarakat
1			

1	Correlations	Pelibatan_Lintas_Sektoral	1,000	-,586
		Pemberdayaan_Masyarakat	-,586	1,000
	Covariances	Pelibatan_Lintas_Sektoral	,001	-,001
		Pemberdayaan_Masyarakat	-,001	,002

a Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Collinearity Diagnostics(a)

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Pemberdayaan Masyarakat	Pelibatan_Lintas Sektoral
1	1	2,991	1,000	,00	,00	,00
	2	,005	23,814	,95	,37	,08
	3	,004	27,230	,05	,63	,92

a Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Lampiran 6 Uji Heterokedastisitas

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,855(a)	,732	,729	2,21583

a Predictors: (Constant), Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat

b Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3293,393	2	1646,697	335,383	,000(a)
	Residual	1207,836	246	4,910		
	Total	4501,229	248			

a Predictors: (Constant), Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat

b Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,581	1,589		3,512	,001
	Pemberdayaan_Masyarakat	,156	,042	,152	3,740	,000
	Pelibatan_Lintas_Sektoral	,432	,023	,757	18,568	,000

a Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Residuals Statistics(a)

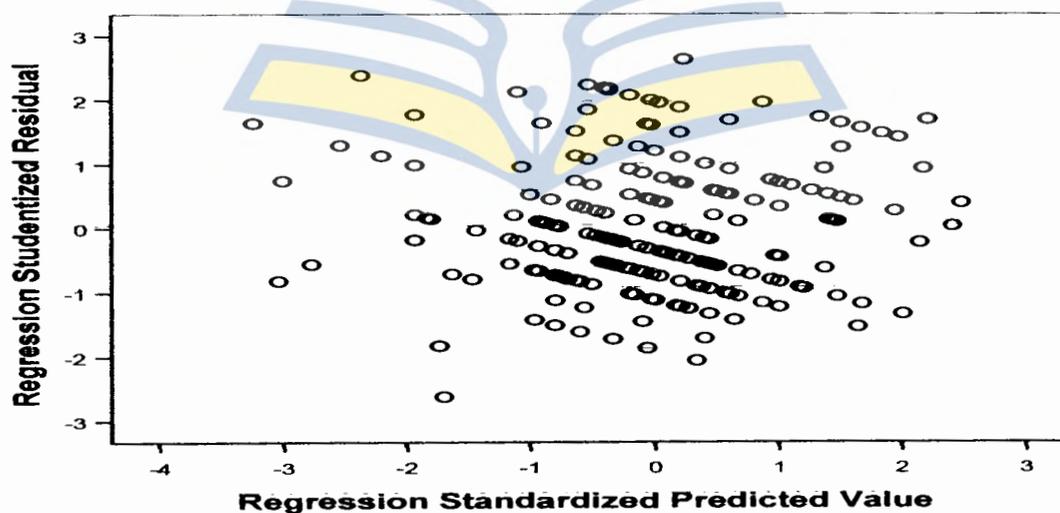
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	37,2228	51,7707	44,9157	3,64415	249
Std. Predicted Value	-2,111	1,881	,000	1,000	249
Standard Error of Predicted Value	,143	,389	,232	,074	249
Adjusted Predicted Value	37,2278	51,7663	44,9157	3,64497	249
Residual	-8,24174	9,46187	,00000	2,20688	249
Std. Residual	-3,719	4,270	,000	,996	249
Stud. Residual	-3,728	4,302	,000	1,002	249
Deleted Residual	-8,27966	9,60386	-,00001	2,23501	249
Stud. Deleted Residual	-3,830	4,465	,001	1,015	249
Mahal. Distance	,031	6,648	1,992	1,882	249
Cook's Distance	,000	,093	,004	,011	249
Centered Leverage Value	,000	,027	,008	,008	249

a. Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Charts

Scatterplot

Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat



Lampiran 7 Uji Normalitas

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,855(a)	,732	,729	2,21583

a Predictors: (Constant), Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat

b Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,581	1,589		3,512	,001
	Pemberdayaan_Masyarakat	,156	,042	,152	3,740	,000
	Pelibatan_Lintas_Sektoral	,432	,023	,757	18,568	,000

a Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

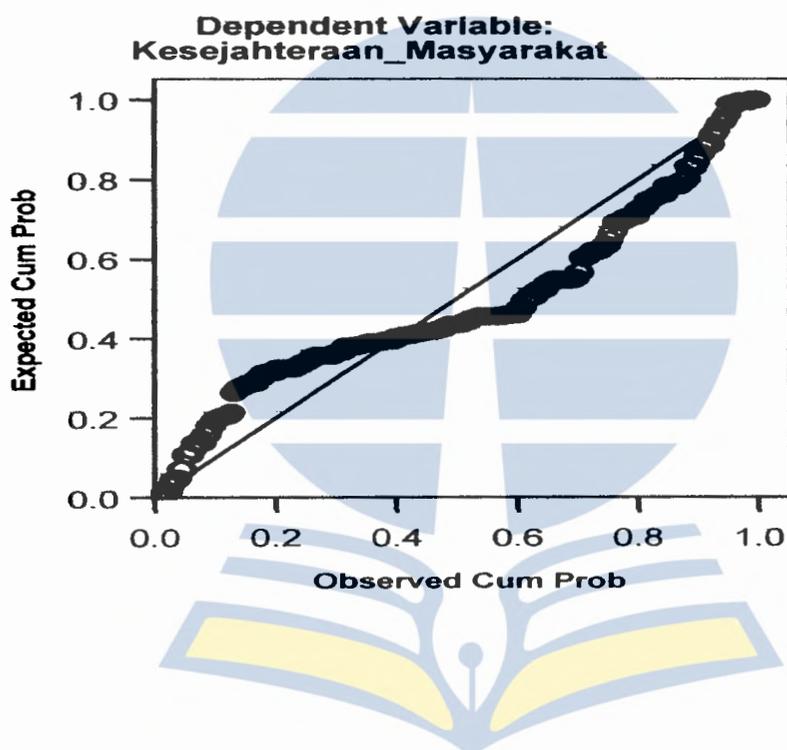
Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	37,2228	51,7707	44,9157	3,64415	249
Std. Predicted Value	-2,111	1,881	,000	1,000	249
Standard Error of Predicted Value	,143	,389	,232	,074	249
Adjusted Predicted Value	37,2278	51,7663	44,9157	3,64497	249
Residual	-8,24174	9,46187	,00000	2,20688	249
Std. Residual	-3,719	4,270	,000	,996	249
Stud. Residual	-3,728	4,302	,000	1,002	249
Deleted Residual	-8,27966	9,60386	-,00001	2,23501	249

Stud. Deleted Residual	-3,830	4,465	,001	1,015	249
Mahal. Distance	,031	6,648	1,992	1,882	249
Cook's Distance	,000	,093	,004	,011	249
Centered Leverage Value	,000	,027	,008	,008	249

a Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 8 Regresi Linear Berganda

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,855(a)	,732	,729	2,21583

a Predictors: (Constant), Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3293,393	2	1646,697	335,383	,000(a)
	Residual	1207,836	246	4,910		
	Total	4501,229	248			

a Predictors: (Constant), Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat

b Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Lampiran 9 Uji F dan Uji T

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1116,766	2	558,383	85,393	,000(a)
	Residual	1608,592	246	6,539		
	Total	2725,357	248			

a Predictors: (Constant), Pelibatan_Lintas_Sektoral, Pemberdayaan_Masyarakat

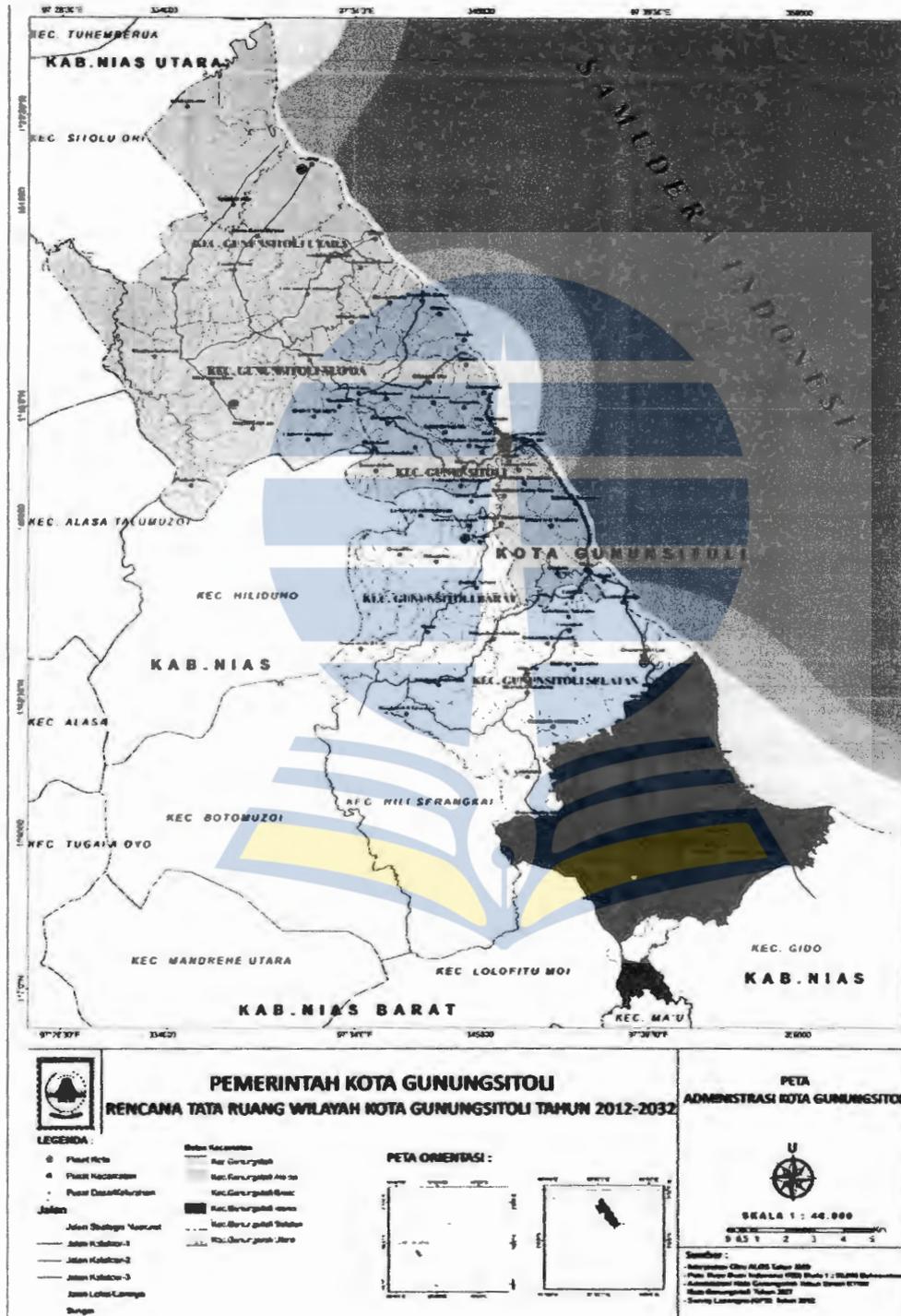
b Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,353	3,979		,591	,555
	Pemberdayaan_Masyarakat	,223	,073	,151	3,074	,002
	Pelibatan_Lintas_Sektoral	,439	,034	,625	12,760	,000

a Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat

Lampiran 10 Peta Administrasi Kota Gunungsitoli



Lampiran 11 Peta Administasi Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa

